

**EVALUASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DI KOTA
BANDAR LAMPUNG (STUDI BANDING SMP NEGERI 2 BANDAR
LAMPUNG DAN SMP NEGERI 45 BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

SUKMA MAULANA

2216041031



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

EVALUASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI BANDING SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG DAN SMP NEGERI 45 BANDAR LAMPUNG)

Oleh

SUKMA MAULANA

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Bandar Lampung berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 masih menghadapi tantangan pemerataan distribusi peserta didik, yang tercermin dari ketimpangan signifikan antara sekolah favorit yang mengalami kelebihan pendaftar dan sekolah non-favorit yang kekurangan peminat di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan SPMB di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dianalisis menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek context, kebijakan SPMB lahir sebagai koreksi atas ketimpangan akses dalam sistem PPDB sebelumnya, namun faktor geografis dan domisili tetap memengaruhi distribusi peserta didik, terutama di wilayah perbatasan. Dari aspek input, sekolah favorit di Kota Bandar Lampung memiliki keunggulan reputasi dan fasilitas, sementara sekolah non-favorit terkendala sosialisasi yang terbatas dan minimnya branding kelembagaan. Dari aspek process, pendaftaran daring telah berjalan sesuai prosedur, namun terhambat gangguan teknis server dan perbedaan pemahaman regulasi di tingkat sekolah. Dari aspek product, transparansi proses seleksi meningkat dan jalur afirmasi memperluas akses bagi kelompok rentan, namun pemerataan distribusi peserta didik antarsekolah di Kota Bandar Lampung belum tercapai secara optimal. Disimpulkan bahwa kebijakan SPMB di Kota Bandar Lampung telah berjalan pada arah yang tepat, namun memerlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas infrastruktur digital, pemerataan fasilitas sekolah, serta kebijakan khusus bagi sekolah di wilayah perbatasan.

Kata kunci : evaluasi kebijakan, sistem penerimaan murid baru, SPMB, CIPP, pemerataan pendidikan.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE NEW STUDENT ADMISSION SYSTEM (SPMB) IN BANDAR LAMPUNG CITY (A COMPARATIVE STUDY OF SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG AND SMP NEGERI 45 BANDAR LAMPUNG)

By

SUKMA MAULANA

The implementation of the New Student Admission System (SPMB) in Bandar Lampung City under the Minister of Primary and Secondary Education Regulation Number 3 of 2025 continues to face challenges in achieving equitable distribution of students, as reflected in the significant disparity between popular schools experiencing an excess of applicants and less-favored schools suffering from a shortage of enrollees in Bandar Lampung City. This study aims to evaluate the implementation of the SPMB policy in Bandar Lampung City and to identify its supporting and inhibiting factors. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using Stufflebeam's CIPP evaluation model (Context, Input, Process, and Product). The findings indicate that from the context aspect, the SPMB policy emerged as a corrective response to access disparities under the previous PPDB system, yet geographical and domicile factors continue to affect student distribution, particularly in border areas. From the input aspect, popular schools in Bandar Lampung City hold advantages in reputation and facilities, while less-favored schools are constrained by limited socialization and insufficient institutional branding. From the process aspect, online registration has proceeded according to procedure, yet is hindered by server technical disruptions and inconsistent understanding of regulations at the school level. From the product aspect, selection transparency has improved and the affirmation pathway has broadened access for vulnerable groups; however, equitable distribution of students across schools in Bandar Lampung City has not been optimally achieved. It is concluded that the SPMB policy in Bandar Lampung City is moving in the right direction, yet requires strengthened socialization, improved digital infrastructure capacity, equalization of school facilities, and special policies for schools located in border areas.

Keywords : policy evaluation, new student admission system, SPMB, CIPP, educational equity.

**EVALUASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DI KOTA BANDAR
LAMPUNG (STUDI PERBANDINGAN SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG
DAN SMP NEGERI 45 BANDAR LAMPUNG)**

Oleh :

SUKMA MAULANA

Skripsi

**Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**EVALUASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
(SPMB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI
PERBANDINGAN SMP NEGERI 2 BANDAR
LAMPUNG DAN SMP NEGERI 45 BANDAR
LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

Sukma Maulana

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2216041031

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.

NIP. 978092 3200312 1001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati caturiani, S.IP., M.SI

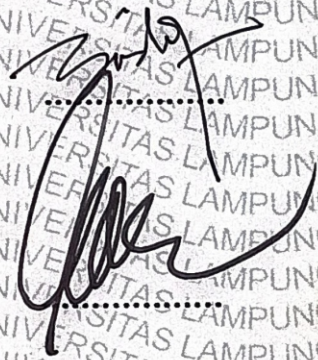
NIP.19700914 200604 2001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua Penguji

: Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.



Penguji Utama

: Dr. Dian Kagungan, M.H.

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M. Si.

NIP. 19760821 200003 2001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 17 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Sukma Maulana

NPM. 2216041031

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 27 Februari 2004, sebagai anak kedua dari dua saudara, dari pasangan Bapak Herijan dan Ibu Fitri Suhartati. Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari TK Kemala Bhayangkara, kemudian melanjutkan ke SDN 2 Gedong Air, SMPN 10 Bandar Lampung, dan SMAN 3 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2022.

Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan pengembangan diri, di antaranya sebagai Staf Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota (PSDA) UKM Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung (KOPMA UNILA), Staf Bidang Humas dan Pengkajian Gugus Fakultas ISIP KOPMA UNILA, volunteer di Busa Pustaka dan Gubuk Literasi, serta Kepala Unit Kreativitas Anggota Desain Kreatif Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung. Penulis juga mengikuti kegiatan eksternal yaitu Pembantu Pembina Pramuka SMP Negeri 10 Bandar Lampung, Pembantu Pembina Pramuka SD Negeri 3 Kaliawi, dan Pelatih Aktif Bidang Pionering SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Pada tahun 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Selanjutnya, pada bulan Juni hingga Juli 2025, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna, dan terus berulang”

(Banda Neira)

“Jika tidak ada orang baik disekitarmu, maka jadilah sebagai orang baiknya”

(Sukma Maulana)

“Hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar, sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama”

(Baskara Putra-Hindia)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat, dan petunjuk-Nya yang telah menganugerahkan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Di antara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karna di sinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh kerendahan hati, penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

Abah dan Emak Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibu yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup.

Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Kalian adalah alasan penulis mampu bertahan dalam setiap proses, bangkit dalam setiap kegagalan, dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk membalas semua kebaikan tersebut, selain doa dan harapan agar karya kecil ini dapat menjadi kebanggaan bagi Ayah dan Ibu.

Kakak Tersayang

Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selalu diberikan. Engkau adalah tempat berbagi cerita, penguat di saat lelah, dan pengingat bahwa penulis tidak pernah sendiri dalam setiap langkah. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk meraih keberhasilan-keberhasilan berikutnya.

Dosen dan Civitas Akademika

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, dan kesabaran yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Setiap proses pembelajaran dan arahan yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis untuk terus belajar, berkembang, dan sampai pada tahap ini.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EVALUASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI PERBANDINGAN SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG DAN SMP NEGERI 45 BANDAR LAMPUNG)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Skripsi ini dibuat sebagai sebuah karya tulis yang merupakan hasil dari pengerjaan tugas akhir yang telah dilakukan. Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, motivasi dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Penulis mengucapkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan ALLAH SWT atas segala nikmat, karunia, serta kemudahan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Berkat izin-Nya, penulis diberi kesehatan, kesempatan, dan kelancaran dalam setiap proses yang dijalani. Semoga pencapaian ini menjadi awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta dapat memberikan manfaat bagi orang lain;
2. Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP., selaku dosen pembimbing utama, Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, nasihat, ilmu, serta waktu yang telah Bapak berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan atas setiap arahan dan dukungan yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi. Semoga segala keikhlasan dan ketulusan Bapak dalam mendidik penulis, baik selama masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT;
3. Dr. Dra Dian Kagungan, M.H., selaku dosen penguji, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga serta membangun bagi penulis. Masukan yang diberikan sangat membantu dalam memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga segala kebaikan Ibu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT;

4. Dr. Dra Dian Kagungan, M.H., selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas nasihat, motivasi, serta dukungan hal baik yang telah diberikan selama masa perkuliahan dan dalam proses pengerjaan skripsi, Semoga selalu dalam lindungan ALLH SWT dan segala kebaikan Ibu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT;
5. Para dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Negara, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta berbagai bantuan selama penulis menjalani masa perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan yang telah diberikan. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang baik dan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah SWT;
6. Segenap pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan pendampingan kepada penulis selama proses penelitian berlangsung. Terima kasih atas segala kesempatan dan kerja sama yang telah diberikan;
7. Seluruh Informan penelitian Ibu Eka, Ibu Eti, Ibu Sri, Bapak Anwar, Bapak Sujatmoko, dan Bapak Andri atas ilmu dan waktu yang telah diluangkan untuk membantu Penulis dalam mengumpulkan data selama penelitian;
8. Teristimewa untuk Orangtua penulis, Bapak Herijan dan Ibu Fitri Suhartati yang dengan penuh kasih sayang telah memberikan doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah terhitung. Terima kasih kepada Bapak yang selalu tiada henti memberikan semangat, serta kepada Mamak yang selalu sabar, tulus, dan mengusahakan apapun yang dibutuhkan oleh penulis. Berkat cinta dan doa kalian, penulis mampu melewati setiap proses hingga menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung;
9. Kepada Saudaraku tercinta, Kakakku Putri Rahayu selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan pendengar setia dalam setiap proses perjalanan perkuliahan. Terima kasih atas semangat, perhatian, dan motivasi yang tidak pernah henti diberikan, yang selalu menjadi penguat di saat penulis merasa lelah;
10. Kepada seluruh teman-teman AMPATRA, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan perjalanan yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan, baik dalam suka maupun duka. Setiap momen yang terlewat menjadi bagian berharga yang akan selalu dikenang. Semoga kita semua senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam setiap langkah ke depan;
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu pemilik nama Senja Rantika, S.A.N. penulis mengucapkan terima kasih yang sedalamdalamnya untuk

setiap dukungan, waktu, tenaga, serta sudah setia menemani penulis sedari awal hingga akhir perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi pendengar, pemberi masukan, memberi semangat, serta partner yang baik selama 3 tahun belakang. Terima kasih karena tetap bertahan dan semoga setiap langkah ke depan selalu dimudahkan, selalu bisa kebersamai di setiap keadaan, dan seperti kata Baskara Putra dalam kutipan lagunya “Semoga kita bertahan lama”;

12. Kepada para Sahabat SMA-ku, Refly Ade Virgian Ohorella, Fadhil Anhari dan Pramudya yang selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan, membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah dari fikiran yang sangat rumit ini. Setiap hal baik yang kalian berikan semoga menjadi bibit hal baik yang akan kalian tuai nanti. Penulis meminta maaf jika sering merpotkan dan terima kasih untuk segalanya, semoga kita tak terpisahkan;
13. Kepada Sahabat perkuliahanku, Galih, Iqbal, Ubaidillah, Arriski, terima kasih sudah selalu mendukung dan kebersamai penulis. Mohon maaf jika penulis pernah berkata kasar kepada kalian, karena pada dasarnya hati penulis ini sangat baik dan lemah lembut. Terima kasih telah memberikan tempat ruang untuk beristirahat disaat selesai perkuliahan, tetaplah menjadi seperti ini sampai berada di kehidupan selanjutnya;
14. Pengusaha Sukses saudari Irmayanti, S.A.N. dan Vivi Amelia, S.A.N. penulis mengucapkan terima kasih atas perjuangan penjualan kewirausahaannya. Semoga CEO, CFO, dan COO ini akan menjadi kenyataan dikemudian hari;
15. B2AY Saudara Dikha, Bagas, Bagus, Rafly, dan Arva terima kasih atas pertolongan dan bantuannya disaat penulis membutuhkan dan selalu tanpa keluh ketika membantu penulis. Semoga cerita kita akan selalu seperti lagu “Ramai Sepi Milik Bersama”;
16. PASGIN Daffa, Vivi, Adepe, Abidah, dan Athaya penulis mengucapkan terima kasih telah kebersamai penelitian di Pasir Gintung dengan mengolah data yang serumit itu, namun dapat diselesaikan dengan maksimal. Pertemanan yang berlanjut ini penulis harap semoga akan terus terjalin hubungan erat dan mencapai sukses bersama;
17. Grup T.E Iqbal, Mero, Tammia, Yolanda, Aril, Arriski, Artiya, Diva, Doni, Galih, Kamila, Meitha, Nashwa, Qaisara, Maynaki, Ubaidillah, penulis mengucapkan terima kasih atas support ketika sedang sakit keras, menjadi teman untuk bertukar fikiran, hingga tempat untuk bertanya ketika penulis sedang dalam tahap pengerjaan skripsinya. Semoga kita semua selalu menjadi orang baik dan masuk surga.
18. Terakhir, Penulis sampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri yang sudah mampu bertahan hingga sampai di titik ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meski banyak hal datang tidak sesuai harapan. Untuk setiap lelah yang

dipendam sendiri, setiap takut yang tetap dihadapi, dan setiap langkah kecil yang terus diusahakan meski sering merasa tertinggal. Terima kasih sudah belajar kuat tanpa harus menjadi sempurna. Terima kasih tetap berjalan walau beberapa kali kehilangan arah. Semua proses yang dilalui mungkin tidak mudah, tetapi dari semua itu penulis belajar tentang sabar, ikhlas, dan percaya pada diri sendiri. Semoga ke depannya hati ini tetap tenang, langkah tetap kuat, dan harapan-harapan baik perlahan menemukan jalannya. Mari terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik tanpa perlu membandingkan diri dengan siapa pun. Karena sejauh ini, diri sendiri sudah berjuang dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 17 Juni 2026

Penulis,

SUKMA MAULANA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Penelitian Terdahulu	19
2.2 Kebijakan Publik	21
2.3 Evaluasi Kebijakan.....	24
2.4 Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).....	27
2.5 Kerangka Berfikir	34
III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Fokus Penelitian	37
3.3 Lokasi Penelitian	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahaan Data	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Lokasi Penelitian	47
4.1.1 SMP Negeri 2 Bandar Lampung.....	47
4.1.2 SMP Negeri 45 Bandar Lampung.....	49
4.2 Hasil Penelitian.....	51

4.2.1 Aspek Konteks Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Berdasarkan (<i>Context Evaluation</i>).....	53
4.2.2 Aspek Input Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Berdasarkan (<i>Input Evaluation</i>).....	64
4.2.3 Aspek Proses Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Berdasarkan (<i>Process Evaluation</i>).....	74
4.2.4 Aspek Produk Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Berdasarkan (<i>Product Evaluation</i>)	87
4.3 Pembahasan Penelitian	98
4.3.1 Kebijakan Hasil Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung	99
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Implementasi SPMB di Kota Bandar Lampung.....	116
V. PENUTUP.....	125
5.1 Kesimpulan.....	125
5.2 Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Persentase Jumlah Siswa Pendaftaran SPMB dan Daya Tampung Sekolah Tahun Pelajaran 2025/2026 Berdasarkan Jalur Pendaftaran	7
2. Perbandingan SPMB Periode 2025/2026	12
3. Preferensi Penerimaan Murid Baru	32
4. Informan Penelitian	41
5. Dokumentasi Penelitian	42
6. Siswa Pendaftar serta Penerimaan Siswa di SMPN 2 Bandar Lampung dan SMPN 45 Bandar Lampung	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Siklus Kebijakan Publik.....	22
2. Kerangka Pikir	36
3. Gedung SMP Negeri 2 Bandar Lampung	47
4. Siswa dan Siswi SMP Negeri 2 Bandar Lampung.....	48
5. Gedung SMP Negeri 45 Bandar Lampung	49
6. Peta Jarak SMPN 45 Bandar Lampung Dengan Perbatasan Kabupaten Lampung Selatan	63
7. Struktur Stakeholder Kebijakan SPMB di Kota Bandar Lampung.....	71
8. Website Pendaftaran SPMB milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.....	82
9. Website Milik SMPN 2 Bandar Lampung	83
10. Poster dan Sosial Media SMPN 2 Bandar Lampung	83
11. Poster dan Sosial Media SMPN 45 Bandar Lampung	85
12. Poster Petunjuk SPMB SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung	105
13. Fasilitas SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SPM Negeri 45 Bandar Lampung	106
14. Website Pendaftaran SPMB <i>Online</i>	109

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan nasional yang berfungsi membentuk sumber daya manusia unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Seiring perkembangan zaman, konsep sistem pendidikan semakin berkembang dengan hadirnya teknologi informasi, kebijakan berbasis data, serta pendekatan manajemen mutu yang menekankan efisiensi dan pemerataan akses pendidikan. Sistem pendidikan yang baik akan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam konteks sistem pendidikan, Indonesia terus mengembangkan mekanisme penyelenggaraan yang menekankan penguatan tata kelola, pembiayaan, dan penjaminan mutu. Sistem pendidikan nasional dibangun melalui kerangka regulasi, standar pelayanan minimal, serta mekanisme perencanaan berbasis data yang bertujuan memastikan seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang layak dan setara. Penguatan sistem ini tampak melalui upaya digitalisasi administrasi pendidikan, integrasi data pokok pendidikan, peningkatan kapasitas satuan pendidikan, serta pelibatan pemerintah daerah dalam pengawasan dan evaluasi. Upaya pemerintah dalam mendukung pendidikan yang berkualitas salah satunya berfokus pada penyempurnaan sistem penerimaan peserta baru.

Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai instrumen pemerataan pendidikan, salah satunya melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi yang diatur sejak tahun 2018. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan mekanisme resmi yang digunakan pemerintah untuk mengatur proses masuknya siswa ke jenjang pendidikan tertentu mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK secara transparan, objektif, dan akuntabel. Sistem ini diterapkan secara nasional untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang adil tanpa adanya praktik diskriminatif atau kecurangan dalam proses seleksi. Tujuan utama kebijakan ini adalah mendekatkan peserta didik dengan sekolah di sekitar tempat tinggalnya sekaligus menghapus stigma sekolah favorit.

Realitas menunjukkan bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan struktural, baik antara wilayah urban dan rural maupun antar satuan pendidikan dalam satu kota. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh menegaskan bahwa penerapan zonasi kerap terkendala ketidaksiapan infrastruktur dan lemahnya sosialisasi (Darya, 2020). Ketidakseimbangan kapasitas dan mutu antar sekolah sebagai hambatan utama tercapainya asas keadilan dan transparansi (Darmawan & Diantari, 2024). Permasalahan pendaftaran peserta didik baru kerap terjadi pada beberapa sekolah di Indonesia. *Data Education Development Index* menunjukkan disparitas signifikan antara sekolah berfasilitas lengkap di kota besar dan sekolah pinggiran yang kekurangan sarana, tenaga pendidik, serta akses digital. Kondisi ini menandakan bahwa misi pemerataan mutu belum sepenuhnya terealisasi meskipun akses pendidikan secara umum telah meningkat.

Melalui penerbita Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, 2025 n pemerintah memperkenalkan sistem baru bernama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai penyempurnaan kebijakan PPDB. SPMB dinilai sebagai inovasi kebijakan yang menggabungkan prinsip zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua dengan dukungan sistem digital berbasis geo-tagging untuk memverifikasi data domisili (Rusmini & Ristanto, 2025). Melalui SPMB,

diharapkan proses penerimaan siswa menjadi lebih adil, transparan, serta mampu mengurangi praktik manipulasi alamat yang sebelumnya marak terjadi dalam PPDB konvensional.

Berdasarkan perspektif sosial-politik, kebijakan SPMB tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga merupakan bentuk intervensi negara dalam distribusi kesempatan sosial (*social opportunity distribution*). Kebijakan penerimaan siswa adalah instrumen politik pendidikan yang merefleksikan nilai keadilan dan pemerataan (Hotmimaida, 2025). Efektivitas zonasi atau SPMB sangat bergantung pada sinergi antara tata kelola birokrasi, kapasitas sekolah, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan menjadi langkah strategis untuk menilai sejauh mana kebijakan pendidikan lokal sejalan dengan tujuan pemerataan mutu secara nasional.

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan pemerintah Kota Bandar Lampung turut mendukung pelaksanaan SPMB yang diatur pada dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2025/2026, menetapkan kerangka operasional SPMB yang konkret, yang diuraikan lebih lanjut dalam petunjuk teknis (juknis) SPMB oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mekanisme seleksi, pembagian jalur masuk, dan alokasi kuota disusun sedemikian rupa agar prinsip keadilan dan pemerataan sosial-politik nyata dalam praktik penerimaan siswa. Pelaksanaan SPMB di Bandar Lampung dilakukan secara online melalui laman resmi SPMB Kota Bandar Lampung. Calon peserta mendaftar dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai jalur pendaftaran. Panitia verifikasi dari Dinas Pendidikan atau sekolah akan memproses berkas-berkas pendaftaran dan melakukan seleksi berdasarkan kriteria masing-masing jalur.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini membagi jalur penerimaan menjadi empat kategori yaitu jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi. Untuk SMP jalur domisili dijatah 40 % dari daya tampung. Jalur afirmasi, yang menyoar siswa dari keluarga ekonomi kurang mampu dan penyandang disabilitas, dialokasikan kuota 25 % untuk SMP. Jalur prestasi baik akademik maupun non-akademik diberikan

kuota sebesar 30 % di SMP. Jika kuota prestasi tidak terpenuhi, sisa ruang dialihkan ke jalur domisili atau afirmasi. Sementara itu, jalur mutasi (karena perpindahan tugas orang tua atau anak guru) maksimal mendapat 5 % dari daya tampung.

Kebijakan kuota tersebut mencerminkan upaya pemerintah kota untuk menyeimbangkan distribusi kesempatan pendidikan jalur domisili mengutamakan kedekatan dan pemerataan wilayah, afirmasi memberikan ruang ke kelompok rentan secara sosial ekonomi, prestasi memberi penghargaan terhadap bakat, dan mutasi menghormati kondisi sosial keluarga. Mekanisme ini juga diatur dalam Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai pedoman operasional di sekolah-sekolah negeri, sehingga pelaksanaan SPMB tetap berbasis aturan formal serta transparan dan akuntabel.

Kebijakan zonasi sudah berhasil memperluas akses tetapi belum menyentuh pemerataan mutu (Hotmimaida, 2025). Salah satu permasalahan utama yang mengemuka adalah ketidakseimbangan jumlah peserta didik dan kapasitas daya tampung sekolah. Sekolah-sekolah unggulan di kota cenderung kelebihan pendaftar, sementara sekolah-sekolah di pinggiran mengalami kekurangan murid. Praktik manipulasi alamat menjadi salah satu persoalan yang paling sering ditemukan. Para orang tua melakukan berbagai cara untuk memasukan anak mereka ke sekolah yang dianggap unggul, termasuk memindahkan alamat Kartu Keluarga secara tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kendala lain yang muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap jalur-jalur PPDB, seperti jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi.

Evaluasi kebijakan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi PPDB belum sepenuhnya mampu menuntaskan akar persoalan kesenjangan pendidikan. Kebijakan PPDB berbasis zonasi telah dilaksanakan sesuai regulasi, namun ketimpangan kapasitas sekolah, kendala infrastruktur digital, serta kurangnya sosialisasi menyebabkan implementasi tidak optimal (Darmawan & Diantari, 2024). Sistem SPMB di Kabupaten Wonogiri juga menunjukkan, bahwa sekolah unggulan tetap mendominasi minat masyarakat, sementara sekolah nonfavorit mengalami kekurangan pendaftar. Praktik manipulasi domisili juga

masih terjadi meskipun sistem telah mengalami modernisasi (Rusmini & Ristanto, 2025).

Periode PPDB tahun 2023 merupakan fase penting dalam memperbaiki sistem zonasi di Indonesia. Pemerintah memperkenalkan pemadanan data antara Dapodik dan Dukcapil untuk memperkuat validitas domisili peserta didik. Pemadanan data pada administrasi PPDB meningkatkan akurasi verifikasi alamat siswa meskipun masih terkendala kemampuan operator sekolah dan stabilitas jaringan di daerah tertentu (Darmawan & Diantari, 2024). Upaya integrasi dua basis data nasional ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menekan praktik manipulasi domisili yang selama ini menjadi kritik utama terhadap kebijakan zonasi. Selain itu, langkah ini memperkuat aspek akuntabilitas sekolah serta memastikan bahwa penerimaan peserta didik lebih mencerminkan kondisi riil persebaran penduduk. Langkah tersebut juga dinilai menjadi pijakan awal bagi sistem PPDB yang lebih transparan dan berkelanjutan, sekaligus memperkecil ketimpangan akses antarwilayah.

Memasuki PPDB tahun 2024, pemerintah kembali memperkuat implementasi kebijakan zonasi melalui peningkatan integrasi data lintas instansi, terutama antara Dapodik, Dukcapil, dan sistem verifikasi domisili berbasis digital. Upaya ini sejalan dengan temuan bahwa mekanisme zonasi masih rentan terhadap praktik manipulasi data kependudukan, termasuk pemalsuan alamat dan pemanfaatan celah administratif dalam penerbitan Kartu Keluarga, sehingga pengawasan digital menjadi semakin krusial (Yenti & Utami, 2024). Penelitian tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan zonasi tetap membutuhkan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan keadilan pendidikan (Yenti & Utami, 2024b). Meskipun integrasi data telah ditingkatkan, hambatan struktural dan teknis masih muncul, terutama terkait stabilitas jaringan, keterbatasan kompetensi operator sekolah, serta ketidaksiapan infrastruktur di beberapa wilayah yang berdampak pada efektivitas verifikasi data domisili (Darmawan & Diantari, 2024).

Sistem PPDB pada tahun 2020–2024 menunjukkan adanya konsistensi masalah terkait penggunaan sistem digital, sebagaimana ditemukan dalam studi longitudinal oleh Jurnal Teknologi Pendidikan (2023) yang mengamati implementasi PPDB di beberapa sekolah. Studi tersebut menunjukkan bahwa sistem digital cenderung

efektif di sekolah perkotaan, tetapi sering gagal di sekolah pinggiran akibat keterbatasan infrastruktur. Zonasi di Kota Bandar Lampung teridentifikasi bahwa sebagian besar hambatan berasal dari ketidaksiapan perangkat, rendahnya literasi digital orang tua, dan ketimpangan fasilitas sekolah (Kurniawan dkk., 2024).

Menjelang akhir 2024, pemerintah mulai mempersiapkan transisi besar menuju Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Berdasarkan analisis Rusmini & Ristanto (2025), SPMB diperkenalkan sebagai respons terhadap kritik publik mengenai manipulasi domisili dan ketidakadilan zonasi dalam PPDB. Sistem ini menekankan verifikasi berbasis *geo-tagging*, transparansi dashboard publik, serta sinkronisasi real-time antara database kependudukan dan pendidikan. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa meskipun SPMB lebih akurat, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan teknologi sekolah.

Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung memperkenalkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 sebagai bentuk penyempurnaan dari PPDB. SPMB dirancang untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam PPDB, terutama ketidakakuratan verifikasi domisili dan ketimpangan daya tampung. Pelaksanaan SPMB mengedepankan penggunaan *geo-tagging*, pepadanan data NIK dengan Dukcapil, serta integrasi database Dapodik untuk memastikan validitas data pendaftar (Rusmini & Ristanto, 2025). Selain itu, SPMB memperkuat jalur afirmasi dan meningkatkan transparansi proses pendaftaran melalui dashboard digital. Namun, sebagaimana dibuktikan oleh sejumlah penelitian, transisi ke SPMB tidak serta-merta menyelesaikan seluruh masalah struktural. Infrastruktur teknologi yang belum merata, literasi digital masyarakat yang rendah, serta persepsi publik yang masih bias terhadap sekolah favorit tetap menjadi tantangan besar.

Pelaksanaan SPMB pada tingkat SMP di Kota Bandar Lampung memperlihatkan sejumlah permasalahan yang berpengaruh terhadap pemerataan akses pendidikan. Dari sisi struktur penyediaan layanan, ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SD dan daya tampung SMP negeri masih menjadi tantangan utama. Meski Bandar Lampung memiliki 45 SMP negeri, jumlah tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan pertumbuhan jumlah calon peserta didik, sehingga persaingan masuk sekolah negeri relatif tinggi (Wawancara dengan Ibu Kurnia Murti

Sulistyawardhani, Staf Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 11 November 2025). Kebijakan zonasi yang kaku ini berdampak langsung pada kesempatan siswa untuk memperoleh pendidikan yang setara, terutama bagi mereka yang berdomisili di wilayah padat penduduk dengan sedikit sekolah negeri. Ketimpangan ini berdampak pada kualitas hasil belajar siswa yang menjadikan wali murid lebih memilih sekolah yang tergolong favorit disbanding dengan sekolah yang berada dekat dari rumah.

Pada implementasi resmi SPMB tahun 2025, jalur afirmasi mengalami peningkatan pendaftar secara signifikan, menunjukkan bahwa kelompok rentan mulai mendapatkan akses yang lebih besar (Rusmini & Ristanto, 2025). Namun, ketimpangan daya tampung sekolah tetap menjadi faktor yang mempengaruhi distribusi pendaftar. Temuan masalah sistem pendidikan memberikan gambaran bahwa pemerataan mutu sekolah harus dilakukan bersamaan dengan perbaikan sistem penerimaan agar memberikan hasil yang optimal (Darmawan & Diantari, 2024). Fenomena serupa dapat diamati di berbagai daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung. Sebagai kota metropolitan dengan kepadatan penduduk tinggi, Bandar Lampung menghadapi ketimpangan pendidikan antar wilayah.

Tabel 1. Persentase Jumlah Siswa Pendaftaran SPMB dan Daya Tampung Sekolah Tahun Pelajaran 2025/2026 Berdasarkan Jalur Pendaftaran

SATUAN PENDIDIKAN		2021	2022	2023	2024	2025
1	SMP NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG	322	336	352	341	382
2	SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG	291	330	326	359	396
3	SMP NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG	277	285	278	283	297
4	SMP NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG	272	269	294	315	297
5	SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG	352	333	275	299	377
6	SMP NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG	333	342	288	325	352
7	SMP NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG	311	312	306	291	320
8	SMP NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG	277	292	270	224	288
9	SMP NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG	236	194	318	270	256
10	SMP NEGERI 10 BANDAR LAMPUNG	329	344	350	313	352
11	SMP NEGERI 11 BANDAR LAMPUNG	345	320	326	338	330
12	SMP NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG	274	288	279	272	288
13	SMP NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG	289	158	310	304	352
14	SMP NEGERI 14 BANDAR LAMPUNG	338	343	350	349	374

SATUAN PENDIDIKAN		2021	2022	2023	2024	2025
15	SMP NEGERI 15 BANDAR LAMPUNG	228	290	265	282	224
16	SMP NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG	289	243	265	282	256
17	SMP NEGERI 17 BANDAR LAMPUNG	278	326	293	299	352
18	SMP NEGERI 18 BANDAR LAMPUNG	180	144	171	120	224
19	SMP NEGERI 19 BANDAR LAMPUNG	297	340	318	328	320
20	SMP NEGERI 20 BANDAR LAMPUNG	317	320	321	319	320
21	SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG	263	254	256	255	272
22	SMP NEGERI 22 BANDAR LAMPUNG	319	314	330	305	320
23	SMP NEGERI 23 BANDAR LAMPUNG	244	250	240	242	264
24	SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG	250	236	352	238	245
25	SMP NEGERI 25 BANDAR LAMPUNG	308	299	261	278	330
26	SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG	200	202	211	233	256
27	SMP NEGERI 27 BANDAR LAMPUNG	266	249	243	238	256
28	SMP NEGERI 28 BANDAR LAMPUNG	207	244	167	189	320
29	SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG	312	323	270	346	352
30	SMP NEGERI 30 BANDAR LAMPUNG	239	198	196	170	256
31	SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG	288	320	309	332	320
32	SMP NEGERI 32 BANDAR LAMPUNG	310	304	318	275	288
33	SMP NEGERI 33 BANDAR LAMPUNG	199	307	190	197	102
34	SMP NEGERI 34 BANDAR LAMPUNG	213	213	206	204	224
35	SMP NEGERI 35 BANDAR LAMPUNG	192	167	123	94	120
36	SMP NEGERI 36 BANDAR LAMPUNG	282	252	160	240	352
37	SMP NEGERI 37 BANDAR LAMPUNG	170	171	140	104	224
38	SMP NEGERI 38 BANDAR LAMPUNG	141	150	100	98	256
39	SMP NEGERI 39 BANDAR LAMPUNG	227	222	191	216	224
40	SMP NEGERI 40 BANDAR LAMPUNG	128	135	119	127	192
41	SMP NEGERI 41 BANDAR LAMPUNG	232	210	191	247	249
42	SMP NEGERI 42 BANDAR LAMPUNG	76	127	91	128	128
43	SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG	174	233	157	187	224
44	SMP NEGERI 44 BANDAR LAMPUNG	256	77	210	244	266
45	SMP NEGERI 45 BANDAR LAMPUNG	114	98	86	61	140
TOTAL		11425	11464	11072	11161	12.537

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2025

Berdasarkan data tabel di atas, pada tahun 2025 terdapat 45 sekolah negeri menengah pertama yang tersebar pada wilayah Kota Bandar Lampung. Selama lima tahun terakhir rata-rata penerimaan murid baru pada tingkat menengah pertama mencapai 11.500 setiap periode tahun ajaran baru dengan beberapa kuota sekolah masih belum terpenuhi. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pendaftar masih bergantung pada jalur berbasis lokasi tempat tinggal, suatu kecenderungan yang konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis jarak tetap menjadi faktor paling dominan dalam seleksi peserta didik di berbagai daerah (Tauhid & Fauziah, 2024). Dari perspektif geografis, pola persebaran sekolah yang tidak merata di mana sebagian besar sekolah negeri berlokasi di pusat kota dan kawasan padat penduduk mendorong konsentrasi pendaftar pada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap lebih mudah dijangkau. Selain itu, kondisi geografis Bandar Lampung yang memiliki wilayah perbukitan dan kawasan pinggiran dengan akses transportasi terbatas turut memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih sekolah, sehingga jalur domisili menjadi pilihan paling realistis bagi banyak keluarga.

Selain faktor geografis dan jarak, ada faktor kebijakan dan administratif yang turut menyumbang ketidakterpenuhan kuota di SMP negeri Bandar Lampung. Menurut Plt Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Bandar Lampung, Mulyadi, setelah jalur zonasi resmi ditutup, masih ada sejumlah SMP negeri yang kuotanya belum penuh, sehingga pihak sekolah mendapat kesempatan menerima calon siswa hingga H+1 atau H+2 dari pengumuman awal. Hal ini mencerminkan bahwa alokasi awal mungkin terlalu optimistis dibanding realitas pendaftar, terutama di jalur zonasi. Selain itu, sistem pergeseran kuota juga dilakukan sisa kursi dari jalur yang tidak terpenuhi akan dialihkan ke jalur domisili atau afirmasi, sesuai aturan SPMB Kota Bandar Lampung, (<https://www.kupastuntas.com>, diakses pada tanggal 18 November 2025). Ketidakpastian ini bisa membuat orang tua enggan memilih SMP dengan kuota “sekunder”, karena khawatir tidak terisi atau dialihkan, terutama bila sekolah tersebut dinilai kurang prestisius dibanding pilihan favorit. Dengan demikian, meskipun jumlah SMP cukup banyak, preferensi masyarakat terhadap beberapa sekolah dan mekanisme alokasi kuota ini menimbulkan paradox beberapa sekolah kekurangan pendaftar meskipun ruang masih tersedia.

Transformasi menuju SPMB pada tahun ajaran 2025/2026 menjadi langkah strategis yang diambil pemerintah daerah untuk memperbaiki sejumlah kelemahan PPDB sebelumnya, terutama terkait ketidakmerataan fasilitas dan kapasitas layanan sekolah. Perubahan mekanisme ini menegaskan bahwa pemerintah berupaya menggabungkan prinsip pemerataan berbasis domisili dengan skema seleksi yang lebih fleksibel melalui jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Pendekatan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ketimpangan antar satuan pendidikan seringkali muncul karena kualitas layanan yang tidak seragam sehingga memengaruhi peluang siswa dalam proses seleksi (Putri dkk., 2024).

Praktik di lapangan juga menunjukkan bahwa laporan awal pelaksanaan menemukan adanya disparitas hasil seleksi antar sekolah akibat keterbatasan fasilitas dan sistem daring yang belum optimal, sebagaimana telah diidentifikasi pula pada evaluasi PPDB di daerah lain yang menghadapi hambatan serupa (Winarti dkk., 2023). Temuan tersebut memperkuat bahwa kebutuhan pembaruan sistem merupakan langkah yang relevan untuk memperkecil ketimpangan antar sekolah dan memperbaiki proses seleksi di masa mendatang. Selain itu, masih ditemukan variasi kemampuan teknis operator sekolah dalam mengelola verifikasi data serta ketimpangan kualitas infrastruktur digital antarwilayah yang menyebabkan proses seleksi berjalan tidak seragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukungnya. Dengan demikian, pembenahan menyeluruh terhadap mekanisme daring, kapasitas teknis sekolah, serta pemerataan fasilitas menjadi prasyarat penting agar kebijakan SPMB ke depan mampu mencapai prinsip keadilan pendidikan secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

Dalam kajian literatur mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan mekanisme dari PPDB menuju SPMB tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bentuk koreksi kebijakan terhadap kelemahan zonasi yang selama ini menimbulkan persoalan ketidakmerataan akses pendidikan. Perubahan tersebut dipicu oleh maraknya manipulasi domisili, ketidaksesuaian kapasitas sekolah, serta kesenjangan kualitas

layanan antar wilayah, sehingga SPMB dipandang lebih adaptif melalui diversifikasi jalur masuk seperti domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi (Maharani et al., 2025). Skema pada SPMB memberikan ruang penyesuaian lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola karakteristik geografis dan sosial masyarakat setempat, sehingga kebijakan penerimaan tidak berlangsung secara seragam dan kaku seperti sebelumnya. Reformasi ini memungkinkan pemerataan akses lebih realistis karena mempertimbangkan kondisi lapangan baik sebaran penduduk, kapasitas sekolah, maupun mobilitas keluarga dalam konteks urban. Dengan demikian, SPMB bukan sekadar perubahan istilah administratif, tetapi langkah strategis menuju sistem penerimaan yang lebih inklusif, responsif, dan mampu menjawab dinamika ketimpangan pendidikan yang masih terjadi.

Berbagai penelitian terdahulu turut memberikan dasar empiris bagi lahirnya SPMB sebagai kebijakan alternatif setelah PPDB zonasi dikritik karena belum mampu memastikan pemerataan kualitas pendidikan. Pelaksanaan sistem zonasi justru memunculkan ketimpangan baru akibat variasi kualitas sekolah yang signifikan antarwilayah, sehingga kebijakan penerimaan yang hanya bertumpu pada jarak tidak cukup untuk menciptakan akses yang adil (Winarti dkk., 2023). Sejumlah emuan lapangan juga memperlihatkan bahwa siswa yang tinggal di wilayah dengan kualitas sekolah yang relatif rendah menghadapi keterbatasan pilihan meskipun lokasi rumah mereka sangat dekat, sementara sekolah-sekolah favorit terus mengalami lonjakan pendaftar yang menyebabkan ketimpangan antarwilayah semakin mencolok. Situasi ini menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan menuntut mekanisme seleksi yang mampu mengakomodasi variasi kapasitas sekolah, kondisi geografis, dan konteks sosial masyarakat secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, kehadiran SPMB menjadi langkah korektif yang tidak hanya menjawab kelemahan zonasi, tetapi juga memperkuat harapan terciptanya sistem penerimaan yang lebih proporsional, adaptif, dan berorientasi pada keadilan pendidikan jangka panjang.

Tabel 2. Perbandingan SPMB Periode 2025/2026

No	Nama Sekolah	Daya Tampung	Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi	Siswa Diterima
1	SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG	320	107	39	159	15	320
2	SMP NEGERI 45 BANDAR LAMPUNG	352	56	35	42	7	140

Sumber: Diolah peneliti, 2025.

Berdasarkan tabel di atas SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung menunjukkan adanya ketimpangan minat pendaftaran siswa yang mencerminkan ketidakseimbangan persepsi mutu dan daya tarik sekolah di tingkat masyarakat. Data Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung mencatat bahwa SMP Negeri 2 Bandar Lampung menerima 320 pendaftar dengan daya tampung 320 kursi, sehingga tingkat keterisian mencapai 100%, menandakan sekolah ini berada pada kategori sangat diminati dengan permintaan yang memenuhi kapasitas. Sebaliknya, SMP Negeri 45 hanya menerima 140 pendaftar dari daya tampung 192 kursi atau tingkat keterisian sebesar 72%, menunjukkan bahwa sekolah ini tidak mencapai pemanfaatan rombongan belajar secara optimal.

Jumlah lulusan dari 26 Sekolah Dasar di zona SMPN 2 Bandar Lampung tercatat hanya 471 siswa, namun tingginya minat masyarakat untuk mendaftarkan anak ke sekolah tersebut menunjukkan bahwa faktor persepsi kualitas jauh lebih dominan dibanding jumlah potensi lulusan lokal. Reputasi SMPN 2 Bandar Lampung sebagai sekolah favorit, didukung fasilitas pembelajaran yang relatif lengkap, prestasi akademik yang konsisten, serta tingginya kepercayaan publik, menyebabkan sekolah ini menarik pendaftar tidak hanya dari wilayah sekitar, tetapi juga dari kelurahan lain yang berada di luar zona terdekat. Kondisi ini diperkuat oleh temuan bahwa reputasi sekolah dan kualitas layanan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan orang tua dalam memilih sekolah, terutama melalui word-of-mouth yang memperkuat citra positif sekolah unggulan (Kartika Sari & Soliha, 2021).

Pada sekitar lokasi SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung, yang keduanya berada di wilayah Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung (berdasarkan data profil sekolah dari Dapodik Kemendikbud), terdapat sejumlah Sekolah Dasar (SD) negeri yang juga melayani pendidikan dasar masyarakat setempat, sehingga berpotensi menjadi feeder bagi SMP melalui jalur zonasi berbasis domisili. Diantaranya, yaitu SDN 2 Rajabasa, SDN 3 Rajabasa, SDN 2 Rajabasa Jaya, SDN 3 Rajabasa Jaya, SDN 1 Rajabasa Raya, dan SDN 1 Gedungmeneng.

SMP Negeri 2 Bandar Lampung tak hanya meliputi area kecamatan Rajabasa saja, tetapi meliputi kecamatan Kemiling dan Langkapura. Pada kecamatan kemiling memiliki 13 Sekolah Dasar (SD), yaitu SDN 1 Sumberejo, SDN 2 Sumberejo, SDN 3 Sumberejo, SDN 4 Sumberejo, SDN 5 Sumberejo, SDN 6 Sumberejo, SDN 2 Kemiling Permai, SDN 3 Kemiling Permai, SDN 1 Beringin Raya, SDN 2 Beringin Raya, SDN 1 Sumber Agung, SDN 1 Pinang Jaya, dan SDN 2 Pinang Jaya. Adapun Sekolah Dasar (SD) pada kecamatan Langkapura, yaitu SDN 1 Langkapura, SDN 2 Langkapura, SDN 3 Langkapura, SDN 2 Segalamider, SDN 3 Segalamider, SDN 1 Gunung Terang, dan SDN 2 Gunung Terang.

Di sisi lain, wilayah sekitar SMPN 45 Bandar Lampung menghasilkan lulusan dari 23 Sekolah Dasar (SD) pada daerah zona SMPN 45 Bandar Lampung menghasilkan angka lebih tinggi dengan total 1.028 siswa, namun jumlah pendaftar yang memilih SMPN 45 tetap rendah dan tidak terserap secara optimal. Untuk SMP Negeri 45 Bandar Lampung meliputi dua tambahan kecamatan selain Rajabasa, yaitu Labuhan Ratu dan Tanjung Senang. Pada lokasi kecamatan Labuhan Ratu memiliki 8 Sekolah Dasar, yaitu SDN 1 Kampung Baru, SDN 2 Kampung Baru, SDN 3 Kampung Baru, SDN 1 Labuhan Ratu, SDN 2 Labuhan Ratu, SDN 3 Labuhan Ratu, SDN 1 Sepang Jaya, SDN 2 Sepang Jaya. Lalu pada kecamatan Tanjung Senang memiliki 9 Sekolah Dasar (SD) di daerahnya, yaitu SDN 1 Tanjung Senang, SDN 2 Tanjung Senang, SDN 1 Way Kandis, SDN 1 Perum Way Kandis, SDN 2 Perum Way Kandis, SDN 3 Perum Way Kandis, SDN 1 Labuhan Dalam, SDN 2 Labuhan Dalam, dan SDN 3 Labuhan Dalam.

Situasi ini berkaitan dengan fakta bahwa sekolah yang masih baru membutuhkan waktu untuk membangun rekam jejak prestasi, citra akademik, serta kepercayaan masyarakat. Kurangnya fasilitas yang dianggap memadai, minimnya prestasi yang dikenal publik, dan lemahnya rekomendasi sosial dari orang tua menyebabkan SMPN 45 belum menjadi pilihan utama, meskipun wilayah sekitarnya memiliki potensi input siswa yang besar. Fenomena tersebut sejalan dengan temuan bahwa kualitas layanan, fasilitas, dan pengaruh lingkungan sosial berperan signifikan dalam keputusan pemilihan sekolah, sehingga sekolah baru atau kurang dikenal cenderung tidak diminati oleh calon peserta didik (Vercelli Jesece Pertiwi dkk., 2024)

Ketimpangan ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyebutkan bahwa preferensi orang tua dan peserta didik terhadap sekolah tertentu umumnya didorong oleh persepsi kualitas akademik, reputasi historis, fasilitas pembelajaran, dan pengalaman alumni, sehingga sekolah yang dianggap lebih unggul cenderung mengalami kelebihan pendaftar, sementara sekolah lainnya mengalami kekurangan peminat (Syakarofath dkk., 2020). Ketimpangan ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyebutkan bahwa preferensi orang tua dan peserta didik terhadap sekolah tertentu umumnya didorong oleh persepsi kualitas akademik, reputasi historis, fasilitas pembelajaran, dan pengalaman alumni, sehingga sekolah yang dianggap lebih unggul cenderung mengalami kelebihan pendaftar, sementara sekolah lainnya mengalami kekurangan peminat. Sistem zonasi di jenjang SMP masih membuat beberapa sekolah favorit kelebihan peminat, sedangkan sekolah lain tidak mampu memenuhi kuota karena citra sekolah memengaruhi keputusan pendaftar secara signifikan (Ardianti & Supriyanto, 2021).

SMP Negeri 2 Bandar Lampung, sebagai salah satu sekolah negeri tertua, telah membangun reputasi historis yang kuat melalui prestasi akademik, jaringan alumni yang mapan, dan fasilitas yang semakin berkembang. Reputasi ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa SMPN 2 adalah sekolah “favorit” dengan kualitas unggulan, sehingga banyak orang tua dan siswa memilihnya sebagai prioritas pendaftaran. Sebaliknya, SMP Negeri 45 Bandar Lampung, yang baru berdiri sekitar lima tahun lalu, masih dalam tahap konsolidasi budaya sekolah, penguatan

kualitas pengajaran, dan pengembangan fasilitas. Karena itu, sekolah ini belum berhasil membangun citra akademik dan sosial yang kompetitif di mata publik.

Preferensi masyarakat terhadap sekolah dengan citra akademik yang lebih tinggi dipengaruhi oleh persepsi kualitas pembelajaran, lingkungan sekolah, dan reputasi historis yang umumnya melekat pada sekolah-sekolah lama, sebagaimana temuan bahwa sekolah non-favorit tetap mengalami kesulitan meningkatkan kualitas input siswa meskipun kebijakan zonasi diterapkan (Sidik, 2024). Ketidakmerataan mutu juga tercermin dari kesiapan sekolah yang belum optimal dalam mengelola keberagaman karakteristik siswa, terutama sekolah yang belum memiliki rekam jejak kuat karena fasilitas dan pengalaman kelembagaan masih terbatas (Musadad & Purwanta, 2023). Selain itu, ketimpangan minat pendaftar dipengaruhi oleh citra sekolah dan kualitas layanan pendidikan, sehingga sekolah favorit terus mengalami kelebihan peminat sementara sekolah lain justru kesulitan memenuhi kuota (Riski Tri Widyastuti, 2020).

Secara geografis, SMP Negeri 2 Bandar Lampung berada di kawasan pusat kota yang telah berkembang lebih dahulu sebagai wilayah pendidikan dan permukiman padat penduduk. Lokasi yang strategis ini membuat aksesibilitas menuju sekolah relatif mudah melalui jaringan jalan utama, transportasi umum, serta berada dekat dengan berbagai fasilitas publik, seperti perkantoran, pusat layanan masyarakat, dan lingkungan permukiman yang sudah lama terbentuk. Posisi geografis tersebut memperkuat daya tarik SMPN 2 karena orang tua cenderung memilih sekolah yang mudah dijangkau dan berada di wilayah pusat aktivitas kota. Berbeda dengan SMP Negeri 45 Bandar Lampung yang terletak pada kawasan pengembangan kota dengan karakteristik permukiman yang lebih baru dan kepadatan penduduk yang belum setinggi area pusat kota. Lingkungan sekitar yang masih berkembang menjadikan aksesibilitas dan cakupan wilayah asal siswa lebih terbatas dibandingkan sekolah-sekolah yang berada di pusat kota. Kondisi geografis ini turut memengaruhi persepsi dan minat masyarakat, karena sekolah yang berada di lokasi yang sudah mapan cenderung lebih dipilih dibandingkan sekolah baru yang berada di wilayah dengan infrastruktur pendidikan yang masih berkembang.

Kondisi tersebut menandakan bahwa meskipun secara normatif kebijakan SPMB telah berupaya menggabungkan prinsip zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua, namun dalam tataran implementasi efektivitasnya dalam menjamin pemerataan kualitas pendidikan masih perlu dikaji lebih mendalam. Belum adanya penelitian yang secara fokus menilai dampak pelaksanaan SPMB terhadap distribusi kesempatan belajar di tingkat sekolah menengah pertama. Penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan akademik tersebut melalui analisis kebijakan pendidikan di Kota Bandar Lampung dengan menyoroti fenomena yang terjadi di SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung sebagai representasi kondisi nyata di lapangan.

Penelitian ini juga diharapkan berkontribusi pada penguatan tata kelola pendidikan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemerataan kualitas. Hasil evaluasi SPMB dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam merancang sistem penerimaan siswa yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah akademik ilmu administrasi publik dan ilmu politik, khususnya pada bidang analisis kebijakan publik pendidikan berbasis keadilan distributif dan pemerataan kesempatan belajar.

Penelitian ini tidak hanya berangkat dari fenomena administratif, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan politik yang signifikan melalui kebijakan pendidikan dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB di Kota Bandar Lampung diharapkan mampu memberikan gambaran empiris tentang efektivitas kebijakan ini dalam menutup kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, serta menjadi pijakan ilmiah bagi reformasi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan hasil pelaksanaan penerimaan murid baru di SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung tahun 2025?

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan implementasi SPMB di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini dirumuskan untuk memberikan arah analisis yang terfokus dan sistematis terhadap implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Tujuan penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan hasil pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung tahun 2025.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat keberhasilan implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Bandar Lampung.

Melalui perumusan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai capaian kebijakan SPMB serta dinamika implementasinya, sehingga dapat menjadi dasar evaluatif bagi perbaikan kebijakan penerimaan murid baru di tingkat SMP pada masa yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan serta penerapannya, berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang administrasi publik dan ilmu politik, khususnya dalam ranah *policy evaluation* di sektor pendidikan. Melalui penerapan model evaluasi CIPP (Stufflebeam, 2017), penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori evaluasi kebijakan pendidikan daerah, terutama terkait efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik yang berbasis zonasi dan digitalisasi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji efektivitas kebijakan pendidikan atau pemerataan kualitas pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan SPMB serta menyusun kebijakan lanjutan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Bagi sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan, hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kesiapan input seperti sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, serta memperbaiki mekanisme seleksi penerimaan peserta didik baru agar lebih efisien dan inklusif. Bagi masyarakat dan kalangan akademisi, penelitian ini menambah wawasan tentang pentingnya partisipasi publik serta pengawasan sosial dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai dengan asas keadilan sosial. Di samping itu, hasil penelitian juga dapat dijadikan acuan akademik dalam penyusunan karya ilmiah dan penelitian lanjutan di bidang kebijakan publik dan politik pendidikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai sistem penerimaan peserta didik baru telah banyak dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan seleksi berpengaruh terhadap pemerataan pendidikan dan distribusi peserta didik di satuan pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Marini, 2019) menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi dalam PPDB sudah berjalan cukup baik di sekolah yang menjadi lokasi penelitian, namun masih terdapat hambatan seperti sosialisasi yang belum merata, gangguan aplikasi pendaftaran online, serta pola pikir masyarakat yang masih dominan memilih sekolah berlabel favorit. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan zonasi membawa tujuan pemerataan, tetapi penerapannya masih dihadapkan pada tantangan teknis maupun sosial.

Penelitian oleh (Anam, 2019) juga menguatkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi tidak lepas dari kendala struktural, terutama terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan petunjuk teknis, pemerataan tenaga pendidik, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Permasalahan keterbatasan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat kembali muncul sebagai temuan penting, sehingga terdapat kelompok calon peserta didik yang tidak memperoleh informasi secara memadai. Penelitian oleh (Purwanti dkk., 2019) mempertegas fakta tersebut melalui temuan bahwa sistem zonasi belum sepenuhnya menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan non-favorit karena ketimpangan fasilitas sekolah masih terjadi dan memengaruhi pilihan orang tua serta peserta didik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maharani dkk., 2025) juga mengamati bahwa pelaksanaan PPDB zonasi secara umum berjalan baik, namun sekolah tetap mengalami ketimpangan daya tampung karena sebagian sekolah kekurangan pendaftar dan sebagian lain mengalami kelebihan pendaftar. Ketimpangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh jarak tempat tinggal, tetapi juga citra mutu sekolah yang melekat di masyarakat. Penelitian (Abdan, 2023) kemudian menambahkan bahwa kemampuan teknologi masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PPDB berbasis jaringan, terutama pada wilayah di mana orang tua peserta didik belum memiliki kecakapan digital yang memadai.

Kajian yang lebih mutakhir beralih pada penelitian terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai tahap penyempurnaan dari PPDB zonasi. Studi yang dilakukan oleh (Suryanti dkk., 2020) menunjukkan bahwa PPDB muncul sebagai respons kritik terhadap sistem zonasi, dengan tujuan memperbaiki proses penerimaan peserta didik agar lebih objektif, terukur, dan tidak rentan manipulasi domisili. Selaras dengan itu, untuk mendukung pelaksanaan PPDB secara digital, penelitian oleh (Pratama dkk., 2024) menunjukkan bahwa sistem informasi pendaftaran berbasis web dapat meningkatkan efisiensi layanan seleksi peserta didik dan meminimalisir kesalahan verifikasi berkas.

Penelitian mengenai dampak SPMB terhadap pemerataan akses pendidikan dilakukan oleh (Rusmini & Ristanto, 2025) yang menemukan bahwa jalur afirmasi pada SPMB memberikan peluang lebih besar kepada kelompok kurang mampu untuk mengakses pendidikan, namun ketimpangan minat masyarakat terhadap sekolah favorit tetap terlihat. Penelitian paling mutakhir oleh (Maharani et al., 2025) menunjukkan bahwa keberhasilan SPMB sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur teknologi sekolah, ketepatan verifikasi digital, dan konsistensi pelaksanaan sistem seleksi di daerah.

Berdasarkan seluruh penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa isu utama pada kebijakan penerimaan peserta didik, baik melalui PPDB maupun SPMB, tidak hanya berkaitan dengan mekanisme seleksi tetapi juga kesiapan sistem, kualitas sekolah, dan persepsi masyarakat terhadap mutu pendidikan. Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus mengenai evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik untuk menilai efektivitas kebijakan pendidikan. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengevaluasi pelaksanaan SPMB tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung, di mana perubahan kebijakan dari PPDB menuju SPMB masih baru diterapkan dan belum banyak dikaji, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai keberhasilan, kendala, serta dampak kebijakan terhadap pemerataan akses pendidikan di daerah.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik

Pemahaman terhadap kebijakan publik menjadi dasar analitis dalam menelaah SPMB sebagai salah satu bentuk kebijakan pendidikan. Menurut Thomas R Dye (Hiplunudin, 2017) menyatakan, kebijakan publik sebagai *is whatever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Sama halnya dengan Dunn (2018) mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan pemerintah yang saling berkaitan dan dibuat untuk memecahkan masalah publik secara sistematis. Definisi ini menekankan bahwa setiap keputusan pemerintah baik berupa tindakan aktif maupun pilihan untuk tidak mengambil tindakan memiliki konsekuensi terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, implementasi SPMB dapat dipahami sebagai bentuk intervensi negara yang sengaja dirancang untuk mengatur proses penerimaan peserta didik secara lebih terstruktur, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sama seperti dijelaskan oleh (Winarno, 2011) bahwa kebijakan publik adalah tindakan otoritatif pemerintah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, mencakup formulasi tujuan, alat pelaksanaan, hingga hasil yang diharapkan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak sekadar ditetapkan, tetapi membutuhkan implementasi yang konsisten dan evaluasi yang berkelanjutan. Pada konteks pendidikan, kebijakan penerimaan peserta didik merupakan instrumen penting dalam mengatur alokasi layanan pendidikan yang adil dan terdistribusi. Perubahan dari PPDB menuju SPMB merupakan bagian dari proses adaptasi kebijakan untuk menjawab tantangan baru terkait pemerataan dan digitalisasi sistem layanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan SPMB sangat ditentukan oleh sejauh mana perumusan, pelaksanaan, dan evaluasinya dilakukan secara terpadu dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, sehingga mampu mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.

2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Lindblom (Winarno, 2011) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik adalah suatu proses yang rumit karena melibatkan banyak langkah dan faktor yang harus dianalisis. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang tertarik untuk mempelajari kebijakan publik membagi proses pembuatan kebijakan publik menjadi beberapa tahap. Berikut merupakan tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (Winarno, 2011) adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus Kebijakan

Sumber: Winarno, 2011

Berikut merupakan penjelasan dari gambar siklus kebijakan publik tersebut:

1. Penyusunan agenda

Beragam-macam masalah bersaing untuk mendapatkan perhatian dan menjadi bagian dari agenda kebijakan, karena setiap masalah memiliki prioritas yang berbeda dalam agenda kebijakan publik. Pada tahap ini, beberapa masalah mungkin tidak mendapatkan perhatian sama sekali, sementara masalah lainnya ditetapkan sebagai fokus utama pembahasan, atau ada juga masalah yang tertunda untuk waktu yang lama karena suatu alasan tertentu.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang telah diterima dalam agenda kebijakan kemudian diberi solusi terbaik dalam pemecahannya. Solusi ini dapat berupa berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan, berbagai alternatif bersaing untuk dipilih sebagai tindakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

3. Adopsi kebijakan

Dari banyak alternatif kebijakan yang diajukan oleh para ahli kebijakan, akan ada satu dari alternatif tersebut yang diambil sebagai kebijakan yang akan dilaksanakan pada konteks kebijakan publik.

4. Implementasi kebijakan

Keputusan mengenai program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif untuk mengatasi masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh lembaga pemerintah di tingkat operasional. Pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan mobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah diimplementasikan akan dinilai atau dievaluasi untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil dalam mengatasi masalah yang ada.

2.3 Evaluasi Kebijakan

2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan secara konseptual dipahami sebagai proses sistematis untuk menilai kinerja kebijakan publik berdasarkan tujuan, standar, dan kriteria tertentu. Evaluasi bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian hasil kebijakan. Menurut (Dewi, 2022) evaluasi kebijakan dijelaskan sebagai kegiatan penilaian terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan guna mengetahui kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Stufflebeam (Affrian, 2023) juga menjelaskan bahwa evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai keputusan alternatif. Oleh karena itu, evaluasi adalah kegiatan yang melibatkan pemberian nilai terhadap suatu "fenomena" dengan mempertimbangkan nilai-nilai tertentu.

Secara akademik, evaluasi kebijakan juga dipahami sebagai upaya analitis untuk menghasilkan informasi yang valid mengenai dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran. Evaluasi tidak bersifat normatif semata, melainkan berbasis bukti empiris yang diperoleh melalui pengumpulan dan analisis data secara objektif. Dengan demikian, evaluasi menjadi alat kontrol publik terhadap akuntabilitas pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan.

2.3.2 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dibedakan berdasarkan pertimbangan waktu dan kronologi perencanaan serta pelaksanaannya menjadi tiga jenis, menurut Westra (Puspaningrum, 2022) :

1. Evaluasi sebelum program dilaksanakan (*pre-programme evaluation*), yang sering disebut juga sebagai studi kelayakan (*feasibility study*). Evaluasi ini dilakukan sebelum program dimulai untuk menilai potensi keberhasilan dan kelayakan program tersebut.
2. Evaluasi yang dilakukan ketika program masih berlangsung (*ongoing evaluation*). Fungsi utama evaluasi ini adalah memberikan masukan dan saran untuk memperbaiki pelaksanaan program yang sedang berjalan.

3. Evaluasi setelah program selesai atau sudah berjalan cukup lama, sehingga diperkirakan telah mencapai hasil tertentu (ex-post evaluation). Evaluasi ini bertujuan untuk menilai dampak program atau hubungan antara sumber daya yang digunakan (input) dengan hasil yang telah dicapai (output) oleh program tersebut

2.3.3 Metode Evaluasi Kebijakan

Menurut Subarsono (Simanjuntak, 2016) terdapat beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program-program yang telah diimplementasikan. Metode-metode tersebut mencakup:

1. Metode single program after-only, di mana informasi diperoleh berdasarkan kondisi kelompok sasaran setelah program dijalankan.
2. Metode single program before-only, di mana informasi diperoleh berdasarkan perubahan kondisi sasaran sebelum dan setelah program dijalankan.
3. Metode comparative after-only, di mana informasi diperoleh berdasarkan kondisi kelompok sasaran program dan kelompok non-sasaran setelah program dijalankan.
4. Metode comparative before-only, di mana informasi diperoleh berdasarkan efek program terhadap kelompok sasaran sebelum dan setelah program dijalankan.

2.3.4 Indikator Evaluasi Kebijakan

Indikator evaluasi kebijakan merupakan ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai kinerja kebijakan secara sistematis. Salah satu model indikator evaluasi yang banyak digunakan dalam evaluasi kebijakan publik adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini menekankan bahwa evaluasi kebijakan harus mencakup analisis konteks kebijakan, ketersediaan sumber daya, proses pelaksanaan, serta hasil atau produk kebijakan.

Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Output) yang dikemukakan oleh Stufflebeam (Nukhbatillah dkk., 2024) memiliki empat aspek yang membantu pengambil keputusan dalam menjawab empat pertanyaan dasar terkait evaluasi.

1. Pertama, aspek *Context* membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan tujuan, prioritas, dan sasaran yang ingin dicapai.
2. Kedua, aspek *Input* membahas tentang bagaimana melaksanakan program, termasuk sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Aspek ini juga mencakup identifikasi program eksternal dan material yang diperlukan dalam mengumpulkan informasi.
3. Ketiga, aspek *Process* memberikan informasi kepada pengambil keputusan mengenai sejauh mana program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dengan melakukan monitoring secara terus-menerus, pengambil keputusan dapat mengetahui seberapa baik program tersebut telah diterapkan, termasuk adanya konflik, dukungan dari staf, kekuatan dan kelemahan material, serta permasalahan penganggaran yang mungkin timbul.
4. Terakhir, aspek *Output* melibatkan pengukuran hasil program dan membandingkannya dengan hasil yang diharapkan. Hal ini memungkinkan pengambil keputusan untuk menentukan apakah program tersebut perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali.

Sedangkan menurut Wahab (Anam, 2019) bahwa pengukuran terhadap efektivitas proyek hanya mungkin dilakukan kalau dokumen proyek tersebut menunjukkan hal-hal berikut:

1. Tujuan-tujuan proyek dirumuskan dengan jelas dan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang terukur (*measurable*). Jika misalnya karena satu dan lain hal pengukuran tersebut tidak mungkin dilakukan secara langsung, maka rencana proyek harus bisa menunjukkan dengan tepat lewat indikator-indikator nyang manakah pengukuran itu dapat dilakukan.
2. Pengukuran terhadap perbaikan kinerja organisasi dalam sebuah proyek yang dimaksudkan untuk pengembangan kelembagaan bukan hanya merupakan persoalan yang agak ilusif, tetapi juga sensitife.
3. Persoalan serius yang seringkali muncul ialah bahwa hasil akhir proyek merupakan proses negosiasi dan perumusan tujuan harus dikompromikan.

4. Evaluatur kemungkinan juga menghadapi masalah bahwa atasannya mempunyai penafsiran berbeda terhadap tujuan proyek, sebagaimana halnya perbedaan penafsiran antara pelaksana proyek dengan evaluator sendiri.

2.4 Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang mulai diterapkan di Indonesia pada tahun ajaran 2025 merupakan reformasi dari sistem penerimaan sebelumnya (PPDB) yang selama ini mengandalkan zonasi wilayah. Reformasi ini diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, yang menggantikan kerangka PPDB dengan pendekatan berbasis domisili serta struktur jalur yang lebih beragam, yakni jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Dalam pandangan akademik, pergeseran ini dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan administratif dan operasional yang ditemukan di sistem lama, seperti manipulasi data domisili, kesenjangan kualitas antar zonasi, serta praktik tidak akuntabel dalam seleksi siswa baru yang sempat menghambat transparansi dan keadilan akses pendidikan (Johan & Tjoneng, 2025). Dengan demikian, kebijakan SPMB ditujukan untuk memperluas akses pendidikan dan meminimalkan peluang kecurangan melalui struktur yang lebih sistematis dan berlapis.

Sebagai bentuk respons terhadap kritik dan evaluasi terhadap sistem lama, studi empiris juga menunjukkan bahwa implementasi SPMB perlu terus dioptimalisasi dalam praktiknya. Penelitian terbaru yang mengevaluasi pelaksanaan SPMB pada level sekolah menengah pertama mengemukakan bahwa meskipun kebijakan ini secara umum telah menegaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan akses pendidikan yang berkeadilan, terdapat tantangan dalam hal sosialisasi, teknik pendaftaran, dan penyesuaian kuota jalur di tingkat daerah aspek-aspek yang memengaruhi ketercapaian tujuan kebijakan secara optimal (Mardatila dkk., 2025). Untuk mengatasi hambatan ini dibutuhkan koordinasi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan, peningkatan layanan informasi publik, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SPMB untuk memastikan kebijakan tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga berjalan efektif dan inklusif di semua jenjang pendidikan.

Dengan demikian, penguatan implementasi SPMB tidak dapat dilepaskan dari komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam menyempurnakan mekanisme kebijakan secara adaptif dan berbasis bukti, sehingga SPMB benar-benar mampu menjawab tujuan pemerataan akses pendidikan, mengurangi ketimpangan antarsekolah, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan peserta didik yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

2.4.1 Pengertian Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan kebijakan baru yang mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang selama ini digunakan dalam penerimaan murid di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di Indonesia. Dalam kajian akademik, SPMB dipahami sebagai transformasi kebijakan seleksi yang tidak sekadar perubahan nomenklatur, namun juga perubahan filosofi dan mekanisme seleksi murid baru agar lebih transparan, akuntabel, adil, serta inklusif. SPMB dirancang untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ditemui pada sistem zonasi PPDB sebelumnya, seperti manipulasi data domisili, ketimpangan akses pendidikan antar daerah, dan minimnya akuntabilitas dalam proses seleksi. Kebijakan ini mengintegrasikan empat jalur penerimaan domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi sebagai upaya memperluas akses pendidikan sekaligus menjamin kesempatan yang lebih merata bagi calon murid dari berbagai latar sosial dan geografis.

Studi menunjukkan bahwa SPMB bukan sekadar mekanisme administratif baru, tetapi merupakan respons kebijakan terhadap kebutuhan pemerataan pendidikan yang lebih luas dan bersifat berkeadilan sosial (Maharani et al., 2025). Oleh karena itu, keberadaan SPMB menegaskan arah baru kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada keadilan substantif dan tata kelola penerimaan murid yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi implementasi, pengawasan yang efektif, serta evaluasi berkelanjutan agar tujuan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dapat terwujud secara nyata.

2.4.2 Tujuan Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Tujuan kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah adalah mewujudkan proses penerimaan peserta didik yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemerataan akses pendidikan, sekaligus memperbaiki berbagai distorsi yang muncul pada sistem penerimaan sebelumnya. Secara substantif, SPMB dirancang untuk menjamin bahwa setiap calon murid memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses layanan pendidikan tanpa diskriminasi latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah tempat tinggal, melalui pengaturan jalur penerimaan yang terstruktur seperti jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Selain itu, kebijakan ini bertujuan menekan praktik manipulasi data kependudukan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses seleksi, serta mendorong distribusi peserta didik yang lebih seimbang antar sekolah.

SPMB juga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat prinsip keadilan sosial dan tata kelola pendidikan yang berintegritas di tingkat satuan Pendidikan (Maharani et al., 2025). Dengan demikian, pencapaian tujuan SPMB sangat bergantung pada pelaksanaan kebijakan yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta evaluasi berkelanjutan, sehingga sistem penerimaan murid benar-benar mampu menghadirkan layanan pendidikan yang merata, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip pembangunan pendidikan nasional yang berkelanjutan.

2.4.3 Ketentuan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Pada tahun pelajaran 2024/2025, seluruh tingkatan satuan pendidikan di Indonesia dalam melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berpedoman pada isi Permendikabud No. 3 tahun 2025 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 14 tahun 2025 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Bandar Lampung. Dengan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pedoman pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2025/2026 di Kota Bandar Lampung. Pedoman ini dibuat agar dapat dijadikan acuan pokok bagi setiap sekolah dalam rangka penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2025/2026. Berikut beberapa ketentuan dalam Pedoman Teknis SPMB SMP Negeri di Kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2025/2026, yaitu :

1. Alur pendaftaran SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 untuk pendaftar TK Negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Calon murid menyiapkan berkas-berkas pendaftaran.
 - b. Calon murid melakukan pendaftaran kesekolah yang akan dituju.
 - c. Panitia Pendaftaran melakukan Verifikasi berkas pendaftaran.
2. Alur pendaftaran SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 untuk pendaftar SMP Negeri melalui jalur Afirmasi/Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:
 - a. Calon murid menyiapkan berkas-berkas pendaftaran.
 - b. Calon murid melakukan pendaftaran melalui website <https://spmb.bandarlampungkota.go.id> dan mengupload file dokumen pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran.
3. Alur pendaftaran SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 untuk pendaftar SMP Negeri melalui jalur Domisli, Prestasi, dan Mutasi adalah sebagai berikut:
 - a. Calon murid menyiapkan berkas-berkas pendaftaran.
 - b. Calon murid dapat mendaftar melalui website <https://spmb.bandarlampungkota.go.id>
 - c. Calon murid mengisi data dan mengirim berkas-berkas pendaftaran pada semua kolom yang telah disediakan di aplikasi tersebut.

4. Kuota pendaftar setiap sekolah diatur dalam jumlah sebagai berikut:
 - a. Jalur zonasi SMP sebanyak 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - b. Jalur afirmasi SMP sebanyak 25% (dua lima persen) dari daya tampung Sekolah.
 - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali SMP paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - d. Jalur prestasi SMP sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

5. Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan melalui situs PPDB Online Kota Bandar Lampung.

2.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat SMP

Penelitian mengenai SPMB pada jenjang SMP sangat penting dilakukan karena memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan ini dipersepsi dan diterima oleh masyarakat, termasuk orang tua, peserta didik, dan pihak sekolah. Dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan subjektif para pemangku kepentingan terhadap implementasi SPMB sehingga makna di balik sikap dan pilihan masyarakat terhadap kebijakan ini dapat dipahami secara lebih mendalam. Studi-studi terdahulu mengenai kebijakan zonasi atau domisili dalam penerimaan murid baru menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini dirancang untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan, pelaksanaannya di lapangan sering menghadapi tantangan dalam hal keadilan, transparansi, dan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku (Zulfa dkk., 2024).

Tabel 3. Preferensi Penerimaan Murid Baru

Aspek/Faktor	Fokus Kajian	Temuan Utama
Keadilan dan Pemerataan Akses	Persepsi masyarakat terhadap kesetaraan kesempatan pendidikan	SPMB dianggap adil jika memberikan peluang setara zonasi membantu akses namun masih menimbulkan pro dan kontra
Kualitas dan Reputasi Sekolah	Makna kualitas sekolah menurut masyarakat	Kualitas dipahami tidak hanya dari prestasi akademik, tetapi juga budaya sekolah dan kedisiplinan
Transparansi dan Prosedur	Kejelasan informasi dan proses seleksi	Transparansi meningkatkan kepercayaan publik prosedur yang rumit menimbulkan ketidakpuasan
Aksesibilitas dan Kemudahan Latar Belakang Sosial Ekonomi	Kemudahan pendaftaran dan penggunaan sistem	Sistem daring memudahkan pendaftaran, namun terkendala literasi digital sebagian Masyarakat
Pengaruh Sosial Ekonomi Pemahaman Kebijakan SPMB	Pengaruh kondisi ekonomi keluarga terhadap pilihan sekolah	Keluarga ekonomi rendah mengutamakan jarak dan biaya ekonomi lebih tinggi mengutamakan kualitas
Pemahaman Kebijakan SPMB	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan	Kurangnya sosialisasi menyebabkan salah persepsi dan resistensi terhadap kebijakan
Kepercayaan terhadap Institusi	Kepercayaan masyarakat pada sekolah dan pemerintah	Kepercayaan terbentuk dari pengalaman sebelumnya dan keterbukaan informasi

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Persepsi masyarakat terhadap keadilan dan pemerataan pendidikan merupakan salah satu faktor dominan yang memengaruhi preferensi terhadap sistem penerimaan murid baru. Kebijakan zonasi yang menjadi dasar SPMB dimaksudkan untuk menjamin kesempatan yang setara bagi calon peserta didik memperoleh akses pendidikan berdasarkan jarak tempat tinggal, tetapi praktiknya menunjukkan disparitas kualitas antar sekolah yang masih terjadi. Studi literatur menyatakan bahwa meskipun kebijakan zonasi berpotensi mendukung pemerataan, resistensi masyarakat muncul akibat ketidakmerataan fasilitas dan persepsi ketidakadilan dalam distribusi kualitas pendidikan antar wilayah.

Selain itu, kualitas dan citra sekolah juga menjadi pertimbangan penting dalam preferensi masyarakat terhadap SPMB. Orang tua tidak hanya melihat aspek jarak,

tetapi juga reputasi sekolah yang dianggap mampu memberikan pembelajaran berkualitas. Fenomena ini selaras dengan temuan bahwa masyarakat cenderung memutuskan pilihan sekolah berdasarkan reputasi sosial yang terbangun dalam komunitasnya, sehingga sekolah-sekolah yang dianggap unggulan tetap menjadi tujuan utama meskipun sistem zonasi diberlakukan (Alfian dkk., 2019).

Faktor transparansi dan kemudahan prosedur penerimaan juga memengaruhi preferensi terhadap SPMB. Ketidakjelasan informasi tentang alur pendaftaran, mekanisme zonasi, dan kriteria seleksi sering mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem ini. Penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan sosialisasi kebijakan yang kurang optimal menjadi salah satu hambatan dalam implementasi sistem zonasi sehingga menimbulkan persepsi negatif di kalangan orang tua dan calon peserta didik. Hal ini terlihat dari kajian yang menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan prosedur kebijakan sangat menentukan penerimaan publik terhadap sistem zonasi dalam PPDB/SPMB (Putri dkk., 2025).

Kemudian, latar belakang sosial ekonomi keluarga turut membentuk preferensi terhadap sistem penerimaan murid baru. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi umumnya lebih memilih sistem yang mempertimbangkan jarak sebagai dasar penerimaan karena memperkecil biaya transportasi dan mempermudah akses. Sebaliknya, keluarga dengan kondisi ekonomi lebih stabil cenderung mencari fleksibilitas dalam pemilihan sekolah berdasarkan kualitas atau kesesuaian minat, bukan semata-mata jarak. Temuan ini konsisten dengan kajian yang menunjukkan kebutuhan penyesuaian kebijakan zonasi agar lebih responsif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat (Oktaviani dkk., 2025).

Akhirnya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan SPMB sangat memengaruhi sikap dan preferensi mereka. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif menyebabkan kesalahpahaman dan resistensi terhadap sistem zonasi, sehingga meskipun kebijakan bertujuan untuk memperluas pemerataan pendidikan, implementasinya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kajian ilmiah menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan pemahaman yang

lebih baik terhadap kebijakan zonasi untuk mengurangi resistensi publik dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan SPMB (Yenti & Utami, 2024).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa preferensi terhadap sistem penerimaan murid baru tingkat SMP dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan pemerataan, kualitas serta citra sekolah, transparansi prosedur, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan. Pendekatan kualitatif menjadi penting karena mampu menangkap kompleksitas dan konteks sosial dari pengalaman masyarakat dalam merespon kebijakan SPMB, sehingga hasil penelitian dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih kontekstual, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

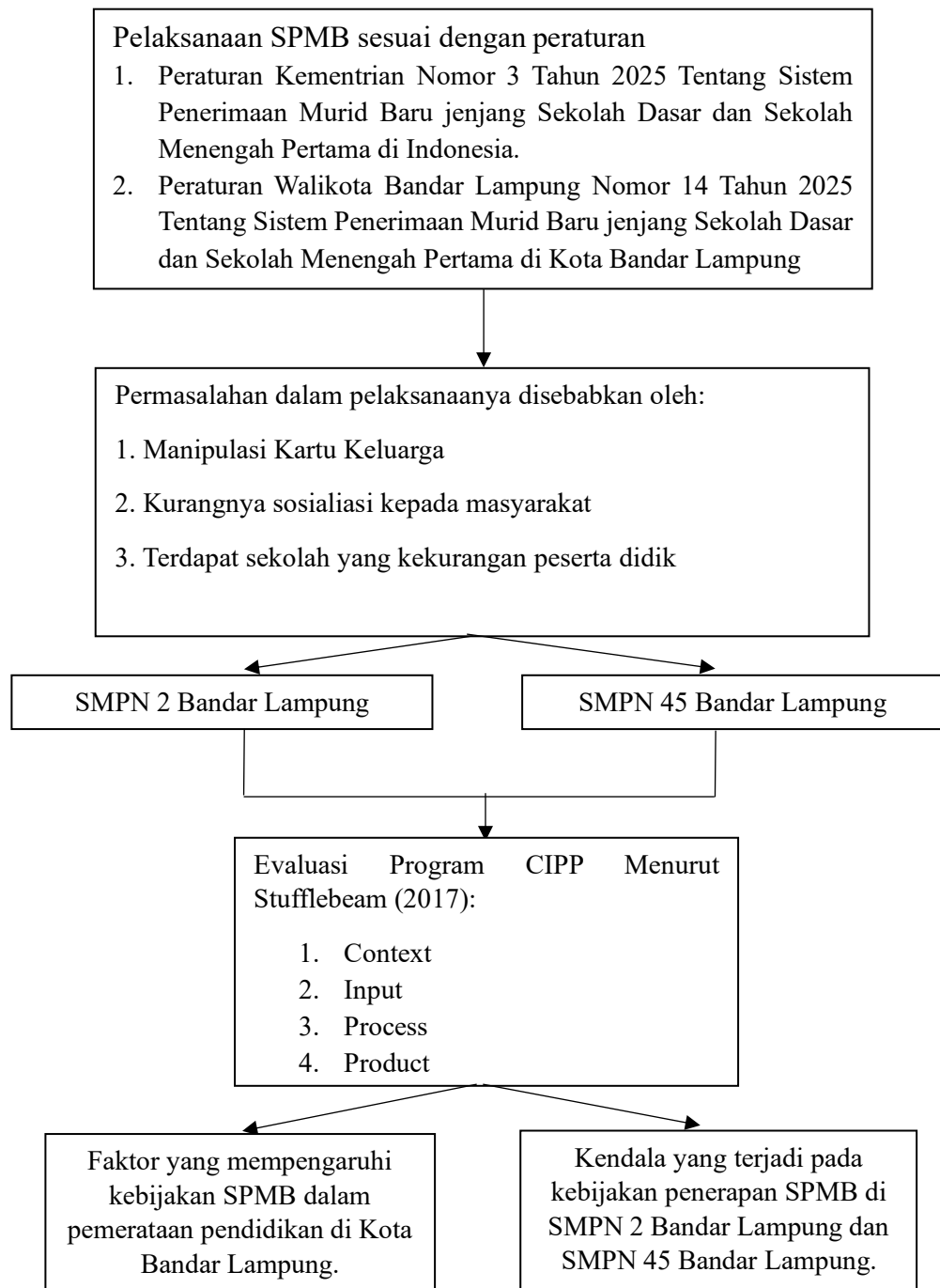
2.5 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah gambaran alur pemikiran yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang mampu memberikan penjelasan kepada pembaca terkait permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengevaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Bandar Lampung (studi kasus SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung) dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kebijakan system penerimaan murid baru dan mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat setelah penerapan sistem domisili dalam SPMB tingkat SMP di Kota Bandar Lampung yang didasarkan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2025.

Permasalahan yang ada dilapangan:

1. Manipulasi kartu keluarga atau merubah titik koordinat tempat tinggal ke daerah yang masuk dalam zona sekolah pilihan.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak orang tua/wali yang mengalami kesulitan untuk melakukan pendaftaran PPDB secara online.
3. Terdapat sekolah yang kekurangan peserta didik. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi belum berjalan secara optimal untuk menciptakan pemerataan pendidikan.

Maka untuk menilai keberhasilan kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Bandar Lampung, penulis memiliki fokus utama yaitu dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Stufflebeam (Wirawan, 2011). Teori ini memiliki empat indikator utama, yaitu *context*, *input*, *process*, dan *outputs*.



Gambar 2 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Saryono (Nasution, 2023), mendefinisikan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena sosial yang sedang terjadi dimasyarakat dan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada pada fenomena tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisis secara intensif penerapan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di tingkat daerah dengan menggunakan instrumen evaluasi kebijakan publik yang relevan. Untuk mencapai pemahaman yang holistik, data dan fakta dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Selanjutnya, data ini dianalisis dengan merujuk pada kerangka teori dan temuan penelitian sebelumnya guna memberikan pemahaman yang mendalam, jelas, dan holistik tentang realitas kebijakan zonasi di Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penetapan masalah dan fokus penelitian memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah dan ruang lingkup kajian. Kejelasan perumusan masalah berfungsi untuk mengarahkan

peneliti dalam menetapkan objek penelitian serta strategi pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga batasan penelitian dapat ditentukan secara sistematis dan pengumpulan data dapat dilakukan secara terfokus dan tepat sasaran (Moleong, 2014).

Fokus dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam (Winarno, 2011) yang menyampaikan terdapat 4 indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut:

1. Indikator Context, fokus konteks diarahkan untuk mengkaji latar belakang, kebutuhan, dan tujuan diterapkannya kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Bandar Lampung. Evaluasi konteks menitikberatkan pada kesesuaian kebijakan SPMB dengan kondisi objektif pendidikan daerah, khususnya terkait ketimpangan daya tampung sekolah, persebaran peserta didik, serta perbedaan minat masyarakat antara SMP Negeri 2 Bandar Lampung sebagai sekolah favorit dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung sebagai sekolah yang relatif kurang diminati. Aspek ini juga mencakup keselarasan tujuan SPMB dengan prinsip pemerataan akses pendidikan dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam regulasi nasional dan kebijakan pemerintah daerah.
2. Indikator Input, fokus input diarahkan pada kesiapan sumber daya yang mendukung pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung. Evaluasi input meliputi ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (panitia SPMB, operator sekolah, dan pihak terkait), kesiapan sarana dan prasarana pendukung, infrastruktur teknologi informasi, serta kelengkapan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan SPMB. Selain itu, fokus input juga mencakup kesiapan sekolah dalam mengelola perbedaan karakteristik pendaftar serta daya tampung yang tersedia pada masing-masing sekolah.
3. Indikator Process, fokus proses diarahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan SPMB secara operasional di lapangan, mulai dari tahap pendaftaran, verifikasi data, seleksi peserta didik berdasarkan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, hingga penetapan hasil penerimaan. Evaluasi proses juga menyoroti konsistensi pelaksanaan SPMB dengan ketentuan yang berlaku,

transparansi dan akuntabilitas sistem seleksi, serta kendala yang muncul selama pelaksanaan, seperti masalah teknis sistem daring, pemahaman masyarakat terhadap jalur pendaftaran, dan potensi praktik manipulasi data domisili.

4. Indikator Product, Fokus produk diarahkan pada penilaian hasil langsung pelaksanaan dari kebijakan SPMB. Evaluasi produk mencakup hasil seleksi penerimaan murid baru, tingkat keterisian daya tampung sekolah, distribusi peserta didik berdasarkan jalur penerimaan, serta perbedaan hasil penerimaan antara SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung. Fokus ini menilai sejauh mana hasil pelaksanaan SPMB telah sesuai dengan tujuan kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.

3.3 Lokasi Penelitian

Menurut (Moleong, 2014), lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data peneliti yang akurat. Adapun lokasi penelitian yang diambil penulis yaitu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, serta SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung. Alasan memilih lokasi ini karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai pihak yang memonitoring pelaksanaan SPMB, SMP Negeri 2 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah favorit dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung pada SPMB tahun pelajaran 2025/2026 mengalami kekurangan peserta didik.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak hanya berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada kata-kata, perilaku, serta tindakan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Data semacam ini membantu peneliti memahami makna sosial dan hubungan antar fenomena yang terjadi dalam konteks penelitian (Mardatillah & Murhayati, 2025). Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menghasilkan informasi yang komprehensif dan valid.

1. Data Primer merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu informan atau objek penelitian melalui teknik seperti wawancara, observasi, atau catatan lapangan. Data primer ini memberikan gambaran empiris yang autentik tentang fenomena yang diteliti karena berasal langsung dari pengalaman dan persepsi para subjek penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data primer untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual sesuai fokus studi (Mardatillah & Murhayati, 2025).
2. Data Sekunder adalah informasi yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti dari subjek penelitian, tetapi berasal dari sumber lain yang telah ada sebelumnya seperti dokumen, buku, laporan, artikel, dan jurnal ilmiah. Data sekunder membantu memperkaya analisis dengan memberi konteks tambahan, memperluas wawasan, serta mendukung temuan dari data primer melalui triangulasi. Misalnya, dokumen kebijakan pendidikan dan peraturan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat dimanfaatkan sebagai data sekunder untuk memperkuat interpretasi terhadap praktik yang terjadi di lapangan (Mardatillah & Murhayati, 2025).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki tujuan untuk memperoleh data yang akan diteliti oleh peneliti, dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi Menurut penjelasan (Sugiyono, 2022), teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang memiliki ciri khas yang berbeda jika dibandingkan dengan teknik lainnya, teknik observasi tidak hanya terbatas pada interaksi dengan orang, tetapi juga mencakup pengamatan terhadap objek-objek alam lainnya. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan sistem penerimaan murid baru di tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung. Peneliti akan secara langsung melakukan pengamatan ke lokasi yang relevan, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, SMP Negeri 2 Kota Bandar Lampung, dan SMP Negeri 45 Kota Bandar Lampung.

2. Wawancara Esterberg (Sugiyono, 2022), mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dengan tujuan untuk membangun makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan terkait penelitian yang dilakukan. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Bandar Lampung. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Informan Penelitian

	NAMA	INSTANSI	HASIL WAWANCARA
1	Media Eka S, S.Pd., MM. (Kadiv Kurikulum)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	SPMB dinilai sebagai kebijakan untuk mengurangi kesenjangan antara sekolah unggulan dan nonunggulan melalui pemerataan jalur penerimaan. Pelaksanaannya sudah membantu pemerataan akses, tetapi masih terkendala fasilitas sekolah yang belum merata dan tekanan dari pihak luar.
2	Kurnia Murti, SE. (Staf Kurikulum)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	SPMB dianggap cukup realistis dalam mengatur akses siswa berdasarkan wilayah dan domisili. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala sinkronisasi data, kesalahan input, dan dokumen pendaftar yang belum sesuai.
3	Muhammad Sujatmoko, M.Si., M.Pd. (Waka Akademik)	SMPN 2 Bandar Lampung	SPMB memberi peluang lebih besar bagi siswa untuk masuk sekolah terdekat. Pada sekolah di wilayah perbatasan, masih diperlukan penyesuaian kebijakan karena siswa yang dekat secara jarak dapat terkendala batas administratif.

NAMA	INSTANSI	HASIL WAWANCARA
4 Andri Susanto, S.Kom. (Operator SPMB)	SMPN Bandar Lampung	2 Sistem digital SPMB membantu keterbukaan informasi mengenai kuota, daya tampung, dan hasil penerimaan. Namun, masih terdapat kendala teknis seperti gangguan server dan penilaian jalur prestasi yang belum sepenuhnya otomatis.
5 Anwar Yusuf, S.Pd. (Waka Kurikulum)	SMPN Bandar Lampung	45 SPMB bertujuan meratakan jumlah pendaftar di setiap sekolah, terutama sekolah yang kurang diminati. Kendala utama masih berkaitan dengan citra sekolah favorit dan persoalan geografis pada sekolah di wilayah perbatasan.
6 Sri Lestari, S.Pd. (Operator SPMB)	SMPN Bandar Lampung	45 Media sosial dan website membantu penyebaran informasi SPMB kepada masyarakat. Proses verifikasi tetap perlu diperkuat karena masih ditemukan data yang salah, kurang jelas, atau tidak sesuai.

Sumber: Diolah oleh peneliti

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2022), dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, catatan angka, serta gambar yang berupa laporan dan keterangan lain yang dapat memberikan dukungan pada penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dari dokumen-dokumen tertulis, seperti perundang-undangan, arsip-arsip, dan foto-foto di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB tingkat SMP di Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa data dokumentasi seperti:

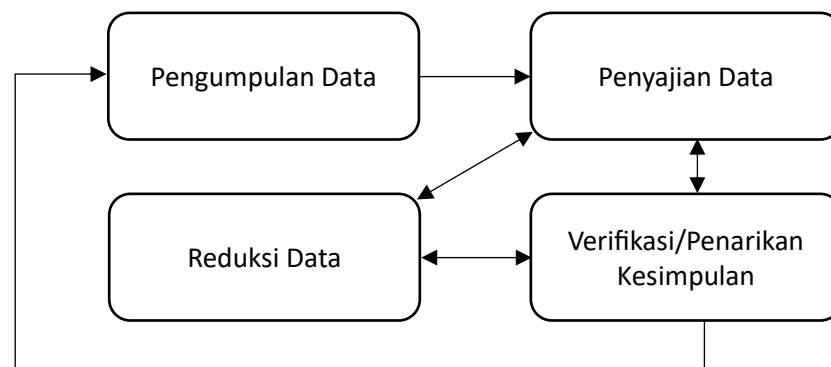
Tabel 5. Dokumentasi Penelitian

No	Nama Dokumen	Substansi Dokumen
1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025.	Tentang system penerimaan murid baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

2	Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2025.	Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung.
3	Juknis Pelaksanaan SPMB di Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2025/2026.	Ketentuan pelaksanaan SPMB tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung.
4	Dokumen penerimaan penerimaan murid baru tingkat SMP Negeri Kota Bandar Lampung tahun 2021 s/d 2025 .	Catatan angka penerimaan murid baru di setiap sekolah tingkat menengah pertama negeri di Kota Bandar Lampung.

Sumber: Diolah oleh peneliti

3.6 Teknik Analisis Data



Gambar 3 Teknik Analisis Data

Sumber: Miles and Huberman 1984 dikutip dalam Sugiyono (2022)

Menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2022) analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lainnya. Tujuannya adalah agar data tersebut dapat dipahami dengan mudah dan temuan-temuan yang dihasilkan dapat disampaikan kepada orang lain dengan jelas dan efektif. Menurut Milles dan Huberman (Sugiyono, 2022) terdapat tiga komponen analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Hasil reduksi data menunjukkan bahwa implementasi SPMB di Bandar Lampung pada SMPN 2 Bandar Lampung dan SMPN 45 secara umum sudah berjalan baik, namun masih terdapat beberapa kendala utama. Permasalahan

yang muncul meliputi gangguan teknis seperti server dan belum optimalnya digitalisasi (jalur prestasi masih manual), serta hambatan sosial berupa rendahnya literasi teknologi orang tua dan kurangnya sosialisasi. Selain itu, terdapat isu aksesibilitas, di mana calon peserta didik dari wilayah perbatasan tidak dapat mengakses sekolah terdekat karena batas administratif. Reduksi ini menegaskan adanya kesenjangan antara keberhasilan sistem secara umum dengan masalah teknis, sosial, dan keadilan akses.

2. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk narasi agar mudah dipahami dan menggambarkan kondisi lapangan secara menyeluruh. Penyajian menunjukkan bahwa implementasi SPMB di SMPN 2 dan SMPN 45 telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala teknis seperti server dan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Selain itu, hambatan sosial juga terlihat dari kurangnya pemahaman masyarakat akibat minimnya sosialisasi dan rendahnya literasi teknologi. Permasalahan akses wilayah perbatasan turut ditampilkan sebagai bagian dari ketimpangan implementasi kebijakan. Penyajian ini membantu melihat keterkaitan antar masalah sehingga memudahkan analisis lanjutan.

3. Verifikasi / Penarikan Data

Verifikasi dilakukan dengan menelaah kembali data dan memastikan konsistensi temuan di lapangan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa implementasi SPMB secara umum sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Temuan mengenai kendala teknis, hambatan sosial, dan masalah akses wilayah muncul secara berulang dan memperkuat validitas data. Kesimpulan yang dihasilkan menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem yang sudah berjalan dengan kualitas pelaksanaannya. Meskipun demikian, kesimpulan ini masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data baru yang lebih kuat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui pengumpulan data tambahan pada tahap selanjutnya.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data dianggap sah atau valid ketika apa yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan realitas yang terjadi dalam objek penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, berbagai teknik pemeriksaan dapat digunakan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini mencakup:

1. Kredibilitas Data (*Credibility*)

Dalam suatu penelitian, kredibilitas merupakan aspek penting yang harus dipenuhi agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kredibilitas menunjukkan bahwa data dan informasi yang disajikan memiliki tingkat kebenaran yang tinggi serta dapat dipercaya oleh pembaca. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Untuk mencapai kredibilitas, peneliti perlu menggunakan teknik-teknik tertentu yang mendukung keabsahan data. Salah satu teknik yang digunakan adalah triangulasi, yaitu membandingkan data berdasarkan berbagai sumber, metode, dan waktu yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih kuat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

2. Teknik Pengujian Keteralihan Data (*Transferability*)

Transferabilitas mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Aspek ini penting untuk menunjukkan bahwa temuan penelitian tidak hanya berlaku pada satu lokasi atau objek tertentu saja. Untuk mencapai transferabilitas, peneliti harus menyajikan data secara rinci, jelas, dan sistematis. Deskripsi yang lengkap memungkinkan pembaca memahami konteks penelitian secara menyeluruh. Dengan penyajian yang detail, peluang generalisasi secara kontekstual menjadi lebih besar.

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (*Dependability*)

Dependabilitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan konsistensi dan keandalan proses penelitian yang dilakukan. Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit seluruh tahapan penelitian secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses penelitian telah dilakukan

secara sistematis dan sesuai prosedur. Peneliti perlu mencatat setiap tahapan secara rinci, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Proses audit biasanya dilakukan oleh dosen pembimbing yang memahami substansi penelitian. Dengan adanya audit tersebut, kualitas penelitian dapat dinilai dan dipastikan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Kepastian Data (*Confirmability*)

Kepastian data dalam penelitian kualitatif berhubungan dengan tingkat objektivitas hasil penelitian. Aspek ini menekankan bahwa temuan penelitian harus benar-benar berasal dari data yang diperoleh, bukan dari bias atau subjektivitas peneliti. Penelitian dikatakan objektif apabila hasilnya dapat diterima oleh berbagai pihak yang membaca atau menelaahnya. Untuk memastikan hal tersebut, peneliti perlu melakukan pengecekan ulang terhadap data dan hasil analisis. Selain itu, hasil penelitian juga dikonfirmasi melalui proses pengujian oleh dosen penguji. Dengan demikian, interpretasi yang dihasilkan dapat dipastikan memiliki validitas dan dapat diterima secara ilmiah.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product), dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan dengan cukup baik, namun masih ditemukan berbagai dinamika yang menunjukkan adanya ketimpangan antar satuan pendidikan.

- a. Pada aspek konteks, kebijakan SPMB lahir sebagai respons terhadap permasalahan dalam sistem sebelumnya, khususnya terkait ketimpangan akses dan dominasi sekolah favorit, Kondisi tersebut terlihat jelas melalui perbandingan antara SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung, di mana SMPN 2 Bandar Lampung menunjukkan tingkat pendaftar yang sangat tinggi, sedangkan SMPN 45 Bandar Lampung masih mengalami kekurangan pendaftar dikarenakan banyak calon pendaftar terhalang administrasi yang tidak sesuai domisili walaupun dekat dengan SMPN 45 Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa faktor geografis dan domisili turut memengaruhi distribusi peserta didik, terutama pada wilayah perbatasan yang berdekatan dengan kabupaten lain. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung telah berupaya merumuskan kebijakan yang lebih adaptif melalui sistem zonasi dan jalur seleksi yang beragam, namun implementasinya masih dihadapkan pada tantangan yang memengaruhi pemerataan pendidikan.

- b. Pada aspek input, kesiapan sumber daya menjadi faktor utama dalam mendukung implementasi kebijakan SPMB. SMPN 2 Bandar Lampung memiliki keunggulan dalam hal reputasi dan fasilitas yang lebih lengkap, menjadikannya lebih menarik bagi calon peserta didik. Sebaliknya, SMPN 45 Bandar Lampung masih menghadapi tantangan dalam menarik minat pendaftar, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pendaftaran dan jalur-jalur yang tersedia. Selain itu, sistem administrasi yang mengharuskan kesesuaian domisili juga menjadi hambatan, meskipun jarak sekolah dengan tempat tinggal calon siswa sangat dekat. Hal ini menyebabkan banyak calon pendaftar yang sebenarnya tinggal dekat dengan SMPN 45 Bandar Lampung, namun tidak dapat mendaftar karena tidak memenuhi persyaratan zonasi berdasarkan domisili. SMPN 45 juga belum membranding dirinya secara efektif, yang membuatnya kurang dikenal dibandingkan SMPN 2 Bandar Lampung. Keberhasilan implementasi kebijakan ini, oleh karena itu, sangat bergantung pada dukungan kelembagaan yang terintegrasi, termasuk peran Dinas Pendidikan dalam menyediakan petunjuk teknis dan melakukan sosialisasi yang lebih masif..
- c. Pada aspek proses, pelaksanaan kebijakan SPMB di Kota Bandar Lampung telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan melalui regulasi dan petunjuk teknis. Proses pendaftaran dilakukan secara online, diikuti dengan verifikasi data dan seleksi berdasarkan jalur yang telah ditentukan. SMPN 2 Bandar Lampung menunjukkan proses yang relatif lebih stabil dan terstruktur karena tingginya pengalaman dalam menghadapi jumlah pendaftar yang besar, sedangkan SMPN 45 Bandar Lampung masih menghadapi tantangan dalam menarik minat pendaftar meskipun proses telah berjalan sesuai prosedur. Dalam pelaksanaan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung berperan aktif melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi, serta monitoring untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala

seperti perbedaan pemahaman terhadap regulasi di tingkat sekolah, keterlambatan verifikasi data, serta kendala teknis dalam sistem digital. Salah satu kendala teknis yang signifikan adalah gangguan server yang sering terjadi saat pendaftaran berlangsung, yang menyebabkan sistem down dan menghambat proses pendaftaran bagi calon peserta didik. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem yang lebih stabil serta peningkatan sosialisasi untuk memastikan proses SPMB berjalan lebih lancar dan adil bagi seluruh calon pendaftar..

- d. Pada aspek produk, kebijakan SPMB telah menghasilkan beberapa capaian positif, terutama dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, serta aksesibilitas dalam proses penerimaan peserta didik. Sistem digital memungkinkan masyarakat untuk memantau proses seleksi secara terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan. Selain itu, jalur afirmasi memberikan kontribusi dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Namun demikian, hasil kebijakan menunjukkan bahwa pemerataan belum sepenuhnya tercapai, yang tercermin dari perbedaan signifikan antara SMPN 2 Bandar Lampung dan SMPN 45 Bandar Lampung dalam hal jumlah pendaftar dan keterisian daya tampung. SMPN 2 Bandar Lampung mengalami kelebihan pendaftar, sedangkan SMPN 45 Bandar Lampung masih belum mampu memenuhi kuota yang tersedia. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi ketidakseimbangan ini adalah fasilitas yang ada di kedua sekolah, baik dalam hal ruang laboratorium maupun fasilitas ekstrakurikuler. SMPN 2 Bandar Lampung memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan lebih menarik bagi calon peserta didik, sementara SMPN 45 Bandar Lampung masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung perlu berfokus pada pemerataan fasilitas, khususnya laboratorium yang memadai serta pengembangan fasilitas ekstrakurikuler yang menarik, agar SMPN 45 Bandar Lampung dapat meningkatkan daya tarik dan citra sekolahnya. Dengan penguatan fasilitas dan peningkatan mutu pendidikan, diharapkan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan SPMB di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan pada arah yang tepat sebagai upaya reformasi sistem penerimaan peserta didik. Namun, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor konteks, kesiapan input, kualitas proses, serta hasil yang dihasilkan. Keterkaitan antara SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung menggambarkan adanya ketimpangan nyata dalam sistem pendidikan yang belum sepenuhnya teratasi oleh kebijakan SPMB. Oleh karena itu, diperlukan peran yang lebih kuat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam melakukan intervensi kebijakan yang bersifat strategis, khususnya dalam pemerataan kualitas sekolah, peningkatan kapasitas sumber daya, serta penguatan sistem teknologi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, kebijakan SPMB diharapkan mampu mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Bandar Lampung, maka peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung serta satuan pendidikan sebagai upaya perbaikan kebijakan secara berkelanjutan:

1. Kewenangan kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk sekolah-sekolah yang berada di dekat perbatasan dipindahkan atau diambil alih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Langkah ini akan mempermudah calon pendaftar yang tinggal di daerah perbatasan untuk mendaftar ke sekolah terdekat tanpa terkendala masalah administrasi domisili yang tidak sesuai dengan zonasi. Pemindahan kewenangan tersebut akan menciptakan fleksibilitas dalam sistem pendaftaran, memastikan bahwa calon siswa dapat mengakses pendidikan dengan lebih mudah. Dengan kebijakan ini, diharapkan pemerataan akses pendidikan dapat

terwujud, terutama bagi mereka yang berada di wilayah perbatasan.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung perlu mengadakan sosialisasi kepada orangtua calon pendaftar secara masif di sekolah-sekolah terdekat sesuai dengan domisili calon pendaftar. Sosialisasi ini harus mencakup informasi yang jelas tentang jalur-jalur pendaftaran, persyaratan dokumen, dan prosedur pendaftaran daring. Dengan mengadakan sosialisasi di tingkat sekolah, diharapkan wali murid calon pendaftar dapat lebih memahami proses pendaftaran dengan baik, sehingga dapat menghindari kesalahan dan keterlambatan, serta memastikan pelaksanaan SPMB menjadi lebih efisien dan optimal.
3. SMPN 45 Bandar Lampung perlu terus membranding dirinya dan memperkenalkan inovasi-inovasi yang menarik, seperti yang telah dilakukan oleh SMPN 2 Bandar Lampung. Dengan memperkenalkan program-program unggulan atau ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan keterampilan diri, SMPN 45 Bandar Lampung dapat meningkatkan daya tarik dan citra positif sekolah. Hal ini akan membantu SMPN 45 Bandar Lampung dalam menarik lebih banyak pendaftar dan memperkuat posisi sekolah dalam persaingan dengan sekolah-sekolah lainnya.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan kapasitas server yang digunakan untuk menampung jumlah pengunjung yang tinggi. Peningkatan kapasitas server ini akan memastikan bahwa website dapat melayani semua pendaftar tanpa gangguan dan memastikan kelancaran proses pendaftaran dari awal hingga akhir. Selain itu, perlu dilakukan perencanaan untuk skalabilitas server dalam menghadapi lonjakan pengunjung yang tidak terduga, terutama pada periode pendaftaran yang padat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses pendaftaran SPMB dapat berjalan lebih lancar, memberikan kenyamanan bagi calon siswa, dan mendukung kelancaran pelaksanaan pendidikan di Kota Bandar Lampung.

5. Perlu dilakukannya peningkatan kualitas dan fasilitas sekolah oleh pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus pada peningkatan, terutama bagi sekolah-sekolah yang fasilitasnya belum memadai. Penyempurnaan fasilitas laboratorium akan menjadikan sekolah lebih menarik bagi calon pendaftar. Langkah ini akan membantu menciptakan pemerataan akses pendidikan yang lebih baik di seluruh kota.
6. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung perlu memprioritaskan pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) pada sekolah yang mengalami kelebihan pendaftar karena kapasitas ruang belajar yang tersedia belum mampu menampung seluruh calon peserta didik yang berminat. Pengadaan RKB perlu dilakukan melalui pemetaan jumlah pendaftar, daya tampung, ketersediaan lahan, rombongan belajar, serta kebutuhan tenaga pendidik agar penambahan ruang kelas sesuai dengan kondisi riil sekolah. Output yang diharapkan dari kebijakan ini adalah meningkatnya kapasitas penerimaan peserta didik pada sekolah dengan permintaan tinggi sehingga siswa pendaftar berpeluang lebih tinggi untuk diterima di sekolah terdekatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdan, M. (2023). *Evaluasi Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Pringsewu (Studi SMPN 2 Sukoharjo dan SMPN 3 Pringsewu)*.
- Affrian, R. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV Bintang Semesta Media.
- Alfian, Ma., Sawo Manila, J., Minggu, P., Ps Minggu, K., & Jakarta Selatan, K. (2019). *Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia *Suatu Telaah Awal Zoning Politics In Educational Practices In Indonesia * A Preliminary Study*. 1(2), 118–134.
- Alifia Putri, K., Trisiana, A., Prasetyo, A., Spetiarko, A., & Alvin Narendra, M. (2025). *Implementasi Sistem PPDB Zonasi Dalam Perspektif Hak Konstitusional Aatas Pendidikan Di Indonesia*. 10(3). <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i3.610>
- Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kabupaten Pamekasan. *REFORMASI*, 9(2), 112. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Ardianti, A. V., & Supriyanto. (2021). *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama*.
- Darmawan, D., & Diantari. (2024). Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sistem Zonasi Menggunakan Model CIPP di Kabupaten Trenggalek. *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan Dan Bahasa*, 2(3), 223–240. <https://doi.org/10.59024/bhinneka.v2i3.860>
- Dewi, D. (2022). *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Gusti Putu Darya. (2020). *Evaluasi Implementasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Balikpapan, Indonesia*.
- Hiplunudin, A. (2017). *Kebijakan, Birokrasi, Dan Pelayanan Publik*. CALPULIS.
- Hotmimaida, N. E. (2025). *Evaluasi Sistem Zonasi Pada PPDB Tingkat SMA*.

- Johan, R. A., & Tjoneng, A. (2025). Government Policy on Student Admissions in Relation to the New Student Enrollment System from the Perspective of Legal Utility. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 5(001), 603–614. <https://doi.org/10.54012/jcell.v5i001.638>
- Kartika Sari, D., & Soliha, E. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Reputasi Sekolah Terhadap WOM (WORD OF MOUTH) Peran Mediasi Kepercayaan. In *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* (Vol. 18, Number 1).
- Kurniawan, A. F., Sulistio, E. B., & Karmilasari, V. (2024). *Aksesibilitas Pendidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Di Kota Bandar Lampung*. 18(01), 43–52. <https://doi.org/10.37295/wp.v18i1.65>
- Maharani, S. P., Sofiyanti, I., Arba, I. A., Nugraha, R. F., & Suhardi, S. (2025). Transformasi Seleksi Peserta Didik dari PPDB ke SPMB Tahun 2025. *Jurnal Basicedu*, 9(4), 837–846. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i4.10133>
- Mardatila, A., Listalia, H., Luqyana, K., Alvina, L., Putri Wijaya, M., Faiza Khairani, N., Amini Putri, N., Lilla Yusa, N., Adiza Putri, R., Salsabila, R., Pohan, R., Zahra Zafira, S., & Widiyastuti, Y. (2025). Optimizing the Management of the New Student Admission System (SPMB) at the Junior High School Level. *International Journal of Education (IJE)*, 3(2), 63–72.
- Mardatillah, N. A., & Murhayati, S. (2025). *Data dan Fakta Penelitian Kualitatif*.
- Marini, K. (2019). *Implementasi Sistem Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung*.
- Moleong, Lexy. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Musadad, A. A., & Purwanta, H. (2023). Schools Zoning System in the New Student Admission in Indonesia: An Evaluative Study from Equitable Education Management Perspective. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 8(2), 415–427. <https://doi.org/10.24042/tadris.v8i2.18396>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harva Creative.
- Nukhbatillah, I. A., Setiawati, S., Hasanah, U., & Nurmalasari, N. (2024). Evaluasi Mutu Pendidikan Menggunakan Pendekatan Teori Stufflebeam. *Jurnal Global Futuristik*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v2i1.352>
- Oktaviani, V., Hayatunnisa, A., Aulia, L., & Talitha, T. A. (2025). *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Pemerataan Akses Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah*. <https://doi.org/10.63822/6w0yna96>
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pub. L. 3 (2025).
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan

Sekolah Menengah Pertama Di Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2025/2026 (2025).

- Pertiwi, E. V. J., Pradiani, T., & Pelayanan, K. (2024). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas, dan Word of Mouth terhadap Keputusan Orang Tua Memilih Sekolah di SMP SBN Kata kunci* (Vol. 7, Number 9). <http://Jiip.stkipyapisdompnu.ac.id>
- Pratama, M. M., Izhari, F., & Akbar, A. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Website. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2). <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i2.14073>
- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastro, J. (2019). *The Effectiveness of New Student Admission of Zoning System Policy for Students Prone to Continue Education*.
- Puspaningrum, H. (2022). *The Evaluation Of Policy On Prohibition Of The Use Of Single-Use Plastic Bags In DKI Jakarta*.
- Putri, D., Meritasari, R., Dhulhijjahyani, F., Rahman, A., Untari, S., Pancasila, P., & Kewarganegaraan, D. (2024). Analisis Implementasi dan Kualitas Pendidikan pada Kebijakan Zonasi di Kota Blitar. In *Journal of Education Research* (Vol. 5, Number 2). <https://blitar.inews.id/read/319163/zonasi-ppdb-SMP-dikeluhkan-wali-murid-di-kota-blitar-masuk->
- Riski Tri Widyastuti. (2020). Dampak Perlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi*.
- Rusmini, & Ristanto. (2025). *Kebijakan Akses Pendidikan Melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Wonogiri 2025*.
- Shofia Azahra Zulfa, H., Abdul Basits Setiawan, F., & Mukhtari Fadli, R. (2024). PT. Media Akademik Publisher. *JMA*, 2(10), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Sidik, F. (2024). Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama: Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *HUMANIKA*, 24(1), 47–56. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.68551>
- Simanjuntak, K. Z. Skripsi. U. M. Area. (2016). *Evaluasi Dampak Implementasi Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Ayu Kabupaten Serdang Bedagai*.
- Stufflebeam, D. L. (2017). *The CIPP Evaluation Model* (G. Zhang, Ed.). The Guilford Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.

- Suryanti, P., Musadad, A. A., & Isawati. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Ddidik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018. *JURNAL CANDI*, 20.
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>
- Tauhid, K., & Fauziah. (2024). *Implementasi Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru* (Vol. 3).
- Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.
- Winarti, N., Rahmi, K., Octa, R., Charin, P., Maritim Raja, U., & Haji, A. (2023). Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 210–225. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.35793246>
- Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi, dan Profesi (Edisi Revisi)*. Rumah Ilmu.
- Yenti, A., & Utami, M. (2024). *Mengurai Tantangan dan Peluang PPDB Berbasis Zonasi: Menuju Pemerataan Pendidikan Berkualitas di Indonesia*.